

56



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

PENGARUH REORGANISASI TANAH TERHADAP KERESAHAN PETANI DI BOJOLALI



Peneliti :

EDY BUDI SANTOSO, S.S.
Dra. SRI WIRYANTI B.U., M.Si.
Drs. HERU SUPRIYADI

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga
SK Rektor Nomor : 9171/J03/PG/1999
Tanggal 23 September 1999
Nomor urut : 39

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

3000130 00 3141

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



1. LAND USE PERPUSTAKAAN
2. AGRICULTURE - SOCIAL ASPECTS
3. LAND TENURE



LAPORAN PENELITIAN
DIK SUPLEMEN UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

KKB
KK-2
306.349
San
P-2

PENGARUH REORGANISASI TANAH TERHADAP KERESAHAN PETANI DI BOJOLALI



Peneliti :

EDY BUDI SANTOSO, S.S.
Dra. SRI WIRYANTI B.U., M.Si.
Drs. HERU SUPRIYADI

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh : Dana DIK Suplemen Universitas Airlangga
SK Rektor Nomor : 9171/J03/PG/1999
Tanggal 23 September 1999
Nomor urut : 39

3000 130 00 3141

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Februari, 2000



DEPARTEMEN PUSTAKA UNIVERSITAS AIRLANGGA BUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1. Puslit Pembangunan Regional | 5. Puslit Pengembangan Gizi (5995720) | 9. Puslit Kependudukan dan Pembangunan (5995719) |
| 2. Puslit Obat Tradisional | 6. Puslit/Studi Wanita (5995722) | 10. Puslit / Kesehatan Reproduksi |
| 3. Puslit Pengembangan Hukum | 7. Puslit Olahraga | |
| 4. Puslit Lingkungan Hidup (5995718) | 8. Puslit Bioenergi | |

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115 — Telp. (031) 5995246, 5995248, 5995247 Fax. (031) 5995246

E-mail: lpunair@rad.net.id — http://www.geocities.com/Athens/Olympus/6223

IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1

1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Reorganisasi Tanah Terhadap Keresahan Petani di Boyolali
- b. Macam Penelitian : () Fundamental, (V) Terapan, () Pengembangan, () Institusional
- c. Katagori Penelitian : () I (V) II () III () IV
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Edy Budi Santoso, S.S.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan dan NIP: Penata Muda (Gol. III/a) 132 205 652
- d. Jabatan Sekarang : Staf Pengajar
- e. Fakultas/Puslit/Jurusan : Sastra/Ilmu Sejarah
- f. Univ./Inst. /Akademi : Universitas Airlangga
- g. Bidang Ilmu Yang Diteliti : Sejarah Sosial
3. Jumlah Tim Peneliti : 3 (tiga) orang
4. Lokasi Penelitian : Boyolali, Surakarta
5. Kerjasama dengan Instansi Lain
- a. Nama Instansi : -
- b. A l a m a t : -
6. Jangka Waktu Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Biaya Yang Diperlukan : 2.750.000,00
8. Seminar Hasil Penelitian
- a. Dilaksanakan Tanggal : 16 Februari 2000
- b. Hasil Penelitian : () Baik Sekali (V) Baik
() Sedang () Kurang

Surabaya, 16 Februari 2000



Mengetahui/Mengesahkan :
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian,

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini
NIP. 130 355 372

LAPORAN PENELITIAN

Edy Budi Santoso...

Ringkasan Penelitian

Judul	: Pengaruh reorganisasi Tanah Terhadap Keresahan Petani di Boyolali
Ketua peneliti	: Edy Budi Santoso
Anggota peneliti	: Sri Wiryanti B.U Heru Supriyadi
Fakultas	: Sastra
Sumber biaya	: Dik Suplemen Universitas Airlangga SK.Rektor Nomor : 917/J03/P5/1999 Tanggal : 23 September 1999

Penelitian ini berusaha mengungkap mengapa dilaksanakan reorganisasi tanah dan juga akibat yang ditimbulkannya bagi petani di Boyolali.

Berbagai masalah yang diteliti adalah :

1. Apa yang menjadi latar belakang dilaksanakannya reorganisasi tanah.
2. Bagaimana pelaksanaan reorganisasi tanah.
3. Bagaimana reaksi masyarakat dalam menghadapi perubahan yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang pengaruh reorganisasi tanah yang dilaksanakan oleh Sunan (PB X) terhadap keresahan petani di Boyolali.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis, dengan menggunakan teori-teori, konsep yang diperlukan penyeleksian, perumusan secara obyektif. Dengan penelitian sejarah kita dapat mengenal usaha-usaha yang dilakukan sebelumnya, disamping itu dapat membantu kita untuk menentukan strategi dan cara yang lebih baik untuk memutuskan atau mengisahkan sesuatu. Pendekatan yang dipakai adalah multidimensional ilmu, namun demikian disiplin dari yang menonjol dalam hal ini adalah sosiologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akhir abad XIX, rakyat Kesunanan Surakarta berada dalam kondisi sosial ekonomi yang memburuk sebagai hasil eksploitasi Kolonial

dan kerajaan Surakarta. Sunan (Paku Buwono X) berusaha mengangkat kembali kondisi kehidupan sosial ekonomi penduduk dengan cara melaksanakan reorganisasi tanah, atas desakan pihak Gubernemen (Belanda). Akan tetapi akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan reorganisasi tanah justru menjauhkan antara petani dengan penguasa feodal (Sunan), sebagai langkah awal mempermudah proses – sewa menyewa tanah. Rupanya hal ini menjadi bumerang bagi Sunan, dan juga Gubernemen (kolonial). Perubahan yang radikal membuat masyarakat resah ditambah tindakan Belanda yang sewenang-wenang dan menyengsarakan rakyat.

Oleh karena pelaksanaan reorganisasi tanah tersebut mengakibatkan implikasi-implikasi sosial, ekonomi dan politik seperti yang di alami para petani Boyolali, maka sudah selayaknya bagi pemerintahan sekarang perlu hati-hati dan dengan pengkajian yang lebih cermat setiap mengambil kebijakan terlebih kebijakan masalah tanah, sehingga peristiwa-peristiwa serupa tidak terulang.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatNya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Lembaga penelitian Universitas Airlangga yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk meneliti tentang pengaruh reorganisasi tanah terhadap keresahan petani di Boyolali
2. Dekan Fakultas Sastra Universitas Airlangga yang telah menyetujui pengajuan proposal penelitian ini untuk diproses ke Lembaga penelitian Universitas Airlangga
3. Berbagai pihak yang tidak bisa saya sebut satu-persatu, yang telah memberi motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, meskipun demikian penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya menyangkut kebijakan masalah agraria.

Surabaya, Pebruari 2000

Ketua Peneliti

DAFTAR ISI

Ringkasan Penelitian	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	3
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
Bab II. Tinjauan Pustaka	5
Bab III. Metode Penelitian	11
3.1 Jenis Penelitian	11
3.2 Lokasi Penelitian	12
3.3 Sumber Data	12
3.4 Teknik Analisa Data	13
Bab IV. Hasil dan Pembahasan	15
4.1 Faktor Penyebab Dilaksanakan Reorganisasi Tanah	15
4.2 Pelaksanaan Reorganisasi Tanah di Boyolali	19
4.2.1 Pelaksanaan Reorganisasi Tanah	19
4.2.2 Akibat Pelaksanaan Reorganisasi Tanah	22
4.3 Keresahan Petani di Boyolali	28
4.3.1 Faktor Penyebab Merosotnya Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Boyolali	28
4.3.2 Keresahan Petani di Boyolali	32
4.3.3 Gerakan Radikal Petani Boyolali	35
Bab V. Kesimpulan dan Saran	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	40
Daftar Pustaka	41
Lampiran	
Surat Perjanjian Gubernur dan Sunan PB X	
Rijksblad Soerakarta	

Daftar Tabel

- 1) **Tabel 1, Penyebaran Ketinggian Tempat dari Jenis Tanaman Wilayah Boyolali**
- 2) **Tabel 2, Luas Tanah, Pajak Tanah dan Harga di Surakarta Tahun 1920-1939**

Daftar Gambar

- 1) Peta 1 Daerah Pertanian Inti Surakarta 1922
- 2) Peta 2 Daerah Vorstenlanden tahun 1921
- 3) Peta 3 penyebaran perkebunaan di Boyolali
- 4) Peta 4 Wilayah Kabupaten Boyolali
- 5) Gambar Sunan PB X bersama Residen ketika naik tahta
- 6) Gambar Sunan PB X pada tahun 1939
- 7) Gambar upacara ritual selamatan masyarakat Boyolali

Bab I

Pendahuluan



1.1 Latar Belakang Penelitian.

Sering dijumpai gambaran yang salah mengenai petani, seolah-olah mereka itu pasif, apatis, fatalistis, enggan berubah, tidak rasional dan bukan merupakan faktor dalam proses perkembangan sosial atau sejarah (Djokosuryo, 1985 : 11). Sehingga banyak orang tidak tertarik pada penelitian masalah petani, namun sejarah dari beberapa negara, juga Indonesia sendiri menunjukkan betapa besar peranan petani atau rakyat pedesaan dalam menghadapi situasi tertentu. (Worf, 1969 : 264). Hampir sepanjang abad XIX dan abad XX, terjadi rentetan peristiwa berupa pembrontakan, kerusuhan, kegaduhan dan pergolakan sosial yang didukung oleh rakyat petani.

Adanya kebijakan baru tentang reorganisasi tanah, yaitu penataan kembali tentang tanah yang mengandung pengertian perubahan status hak milik tanah atas tanah secara perseorangan dari Sunan kepada petani. (Biwada Noto, 1939 : 44). Perubahan tersebut mengandung dimensi yang kuat, mencakup penghapusan tanah lungguh, penciptaan pemerintah desa, pergantian sistem sewa tanah dan pengurangan kerja wajib. Implikasi lain yaitu tumbuhnya perkebunan di Boyolali tahun 1920-an mengakibatkan terjadinya marginalisasi kaum miskin. Terjadinya eksploitasi petani tanahnya disewa, lalu mereka menjadi buruh (Kartodirjo, 1970 : 38). Situasi seperti itu tidak dapat menciptakan kondisi yang baik bagi petani tetapi justru menciptakan ketimpangan baru yang meresahkan petani di Boyolali.

Sebenarnya yang menjadi masalah utama dalam kehidupan petani adalah masalah tanah dan perlindungan hukum yang dapat menjamin ketenteraman selama memanfaatkan tanahnya. Akan tetapi sejak diberlakukannya reorganisasi tanah, tampak sekali gejala runtuhnya tatanan sosial kultural di pedesaan (Suhartono, 1991 : 39). Reorganisasi tanah menimbulkan perubahan bagi petani, dari sistem pemerintahan yang berpusat pada raja sebagai "*patron*" dan rakyat sebagai "*clien*" dipaksa kepada lembaga pemerintah desa yang tidak kuat dan berakar dalam masyarakat. Munculnya perkebunan mengakibatkan terjadinya *marginalisasi* kaum miskin desa. Situasi seperti itu tidak dapat menciptakan kondisi yang baik bagi petani, tetapi justru menciptakan ketimpangan baru bagi petani.

Tumbuhnya perkebunan di Boyolali tahun 1918 mengakibatkan terjadinya *marginalisasi kaum miskin*, yaitu dengan masuknya uang, melalui upah dan sewa paksa, maka petani cenderung komersial, terjadi eksploitasi petani, tanahnya disewa lalu menjadi buruh (Suhartono, 1991 : 123). Memudarnya peranan priyayi istana dan hal-hal diatas tidak dapat menciptakan kondisi yang baik bagi petani tetapi justru menciptakan ketimpangan baru yang meresahkan masyarakat (petani).

Keresahan petani muncul di Boyolali dalam bentuk aksi pencabutan bibit kopi dan aksi pemogokan. Setelah Serikat Islam (S.I) masuk Boyolali (1920) keresahan petani menjadi lebih radikal dalam bentuk pengrusakan dan penganiayaan. Dua peristiwa yang patut dicatat yang terjadi di Boyolali adalah penganiayaan Penewu Sawahan tahun 1927 dan pengrusakan perkebunan di Banyudono serta Mojolegi Teras terjadi tahun 1936.

1.2 Permasalahan.

Pelaksanaan reorganisasi tanah yang semula bertujuan untuk memajukan kondisi sosial-ekonomi petani, tetapi justru mengakibatkan keresahan petani di Boyolali tersebut menarik untuk diteliti dan diungkap kembali keunikannya. Oleh karena itu, berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengungkap permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apa yang menjadi faktor penyebab dilaksanakannya reorganisasi tanah di Boyolali ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan reorganisasi tanah di Boyolali ?
- 3) Bagaimana reaksi masyarakat (petani) dalam menghadapi perubahan yang terjadi ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh reorganisasi tanah terhadap keresahan petani di Boyolali, bertujuan antara lain :

- 1) Untuk mengetahui latar belakang diterapkannya kebijakan reorganisasi tanah
- 2) Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan reorganisasi tanah di Boyolali
- 3) Untuk mengetahui reaksi masyarakat desa dalam menghadapi perubahan yang terjadi atas diterapkannya reorganisasi tanah di Boyolali

I.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain :

- 1) **Manfaat praktis**, dapat memberi masukan kepada lembaga-lembaga pemerintah atau perencanaan pembangunan nasional dalam menentukan kebijakan (masalah tanah) dalam melaksanakan pembangunan
- 2) **Manfaat akademis**, hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan sejarah sosial serta memberikan masukan bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah petani dan agraria

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Persoalan tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, terlebih bagi penduduk desa yang mendasarkan kehidupannya pada hasil pertanian. Tanah mempunyai arti khusus, karena keadaan kepemilikan tanah bukan hanya mempengaruhi sistem sosial, budaya dan politik. Terbukti bahwa setratifikasi sosial yang terdapat dalam masyarakat desa tidak dapat dipisahkan dengan kepemilikan tanahnya (Purwanto, 1985 : 4).

Begitu pentingnya masalah tanah bagi kehidupan manusia, oleh karena itu perlu adanya peraturan yang mengatur penggunaan tanah, sehingga mempunyai ketentraman dan kepastian dalam menggunakan hak dan kewajibannya selama memanfaatkan tanah tersebut. *Reorganisasi tanah* adalah penataan kembali tentang tanah yang mencakup pengertian perubahan status hak milik atas tanah secara perseorangan dari Sunan kepada petani (Biwodo Noto, 1938 : 44). Adanya kebijakan baru tersebut semula bertujuan ingin memperbaiki keadaan perekonomian rakyat, ternyata justru menimbulkan keresahan bagi petani di Boyolali .

Keresahan menurut Suhartono, menunjuk kepada keadaan yang tegang, gelisah, keadaan tidak tentram di kalangan penduduk, sebagai suatu gejala runtuhnya tatanan sosial kultural di pedesaan (Suhartono, 1991 : 139). Berdasar keadaan ini, kemudian timbul kegiatan yang terorganisasi seperti gerakan sosial, gerakan keagamaan dan gerakan lainnya.

Petani adalah orang yang mata pencahariannya bercocok tanam di pedesaan dan membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam, mencakup penggarapan atau menerima bagi hasil antara pemilik dan penggarap (Lansberger, 1984 : 10). Hak otonom petani menjadi hilang setelah adanya penyelewengan sistem sewa tanah, bahkan terkadang disertai tindakan represif dan menimbulkan benturan kepentingan antara petani dan pihak perkebunan. Petani terusik ketentramannya dalam mengolah tanahnya dan siklus kehidupan tradisional terganggu (Mubyarto, 1992 : 52).

Meluasnya usaha-usaha perkebunan modal asing disertai dengan tekanan pajak yang besar dan kerja wajib. Realitas kehidupan petani makin buruk karena pencaplokan tanah mereka, tekanan pajak dan pengerahan tenaga kerja wajib. Pada kalangan petani Boyolali paduan ketiganya menciptakan kemiskinan yang tidak dapat diterima lagi dan suasana ketidakpuasan yang meresahkan berujung pada pembrontakan petani (Fauzi, 1999 : 47).

Berkaitan dengan munculnya kemiskinan dikalangan petani, ada beberapa pendapat tentang kemiskinan itu sendiri. Ada tiga idiologi yang besar didunia yang memandang kemiskinan :

- 1) *Kaum konservatif* memandang bahwa kemiskinan muncul karena karakteristik khas yang dimiliki oleh orang miskin, mereka menjadi miskin karena malas bekerja dan lain-lain.
- 2) *Kaum liberal* memandang kemiskinan merupakan "*valistic and situational adaption*", orang miskin dapat menjadi kaya apabila diberi peluang yang sama bagi orang-orang miskin tersebut.

3) *Kaum radikal* lebih menekankan pada peranan struktur ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Ada unsur kesengajaan dalam rangka menunjang kelompok dominan, kelas kapitalis, ruling elite.

Sejalan dengan penilaian kaum radikal, Adi Sasono mengungkapkan keterbelakangan dan kemiskinan terjadi disebabkan oleh pertukaran yang tidak adil dalam perdagangan barang, pembayaran yang tidak adil atas jasa-jasa pekerja dan pungutan yang memberatkan (Dieter Evers, : 1982 : 39).

Adanya campur tangan agroindustri ke pedesaan secara tidak langsung menciptakan kemiskinan, maka munculah perlawanan petani yang merupakan usaha balas dendam terhadap sistem ekonomi perkebunan dan sistem ekonomi dan politik kolonialisme yang telah menyengsarakan mereka. (Fauzi, 1999 : 48).

Masalah reorganisasi tanah dan implikasinya terhadap keresahan petani di Boyolali ini dapat didekati dengan pendekatan *sosiologis*. Pendekatan sosiologis bukan saja menambah kerangka acuan baru dan memberi wawasan yang lebih dalam untuk mengungkap fakta sejarah yang terabaikan. (Soedjatmoko, 1985 : 307). Juga membantu merekonstruksikan keadaan-keadaan pada jaman yang tidak banyak meninggalkan sumber-sumber sajarah.

Mengingat dalam ilmu sosiologi mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial di dalamnya termasuk perubahan-perubahan sosial. (Soekamto, 1987 : 6). Selain itu dalam sosiologi peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak dilihat secara radikal tetapi secara bertahap. Oleh karena itu dengan pendekatan ini diharapkan dapat mengetahui perubahan-perubahan di balik yang tampak, sehingga diketahui apa yang menyebabkannya dan bagaimana pengaruhnya.

Lebih lanjut Onghokham mengatakan bahwa dalam struktur sosial tradisional dikenal tiga kelas sosial : (1). *Sentono dalem* (pangeran), yakni mereka yang berdarah raja atau yang termasuk keluarga raja. (2). *Abdi dalem* (priyayi), yakni korps hamba kerajaan yang merupakan penghubung antara rakyat atau petani dengan pihak kerajaan. (3). *Kawulo dalem*, yakni rakyat kebanyakan atau petani. (Onghokam,1991 : 61).

Satu-satunya daerah dimana raja sungguh-sungguh berkuasa adalah daerah-daerah yang memiliki tanah kerajaan (*Negorogung*) yang mengelilingi keraton. Daerah-daerah yang lebih jauh, penguasa aktualnya adalah para penguasa daerah entah dari keluarga raja atau aristokrasi (*bupati*) yang diangkat oleh raja. Penguasa daerah dengan orang-orang bawahannya berhak memungut pajak dan menuntut tenaga kerja dari penduduk tani yang dikuasainya. Pada umumnya kewajiban utamanya adalah menyatakan hormat dan membayar upeti terhadap raja pada upacara-upacara tahunan. Raja mengagap dirinya sebagai pusat dunia atau (*Paku Buwono*).

Dengan adanya campur tangan kolonial dalam bidang agraria, terjadi perombakan agraria yang disesuaikan dengan kepentingan kolonial. Kehidupan masyarakat pedesaan beralih dari tingkat *solidaritas mekanis* yang seragam kearah *solidaritas organis* yang lebih beraneka ragam sifatnya. Pandangan tradisional tentang masyarakat sebagai suatu struktur yang kompleks dan sepenuhnya terintegrasi sedang diganti dengan pandangan baru.

Masuknya ekonomi uang, maka penduduk menghargai segala sesuatu dengan uang sehingga cara pola pikir petani cenderung komersial. Memudarnya peran

priyayi istana sebagai penguasa feodal, mereka bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai penerima gaji pemerintah. Lembaga tradisional dirusak, salah satunya para pejabat desa bekerja selaku instrumen dari penguasa kolonial. (Bremen, 1986 : 185). Kondisi petani menjadi semakin sulit dengan adanya berbagai macam pajak seperti : pajak bumi (*landrente*), pajak pekerjaan (*bedrijs belasting*) dan berbagai kerja wajib yang membuat petani semakin resah belum lagi adanya upacara adat yang menyita biaya dan tenaga sehingga semakin membebani petani. Terciptanya kesenjangan yang menyolok antara penguasa perkebunan dengan rakyat desa menimbulkan dendam di hati penduduk.

Keresahan petani menurut kaca mata sosiologis bisa dilihat dari kondisi psikologis seseorang atau kelompok dengan apa yang disebut *frustrasi*. Artinya situasi yang dihadapi secara individu atau kelompok mengalami hambatan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Dalam kaitannya dengan konsep *frustasi-agresif* ini telah dikembangkan suatu teori yang biasa dikenal dengan istilah deprivasi relatif (*relative deprivation theory*). Menurut David F Aberle bahwa deprivasi relative terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara harapan yang wajar dengan kenyataan yang didupakannya (Muryadi, 1997 : 6).

Deprivasi berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang yaitu perasaan. Dalam situasi perasaan yang serba resah, sipelaku akan memberikan ukuran-ukuran tertentu sebagai titik pembandingan antara kelompoknya dengan kelompok lain. Sebagai refrensi yaitu keadaan masa lampau dibandingkan dengan keadaan masa sekarang, dan keadaan masa mendatang. Apabila di dalam membandingkan itu seseorang atau kelompok merasa dirugikan maka mereka akan melakukan aksi, salah satunya gerakan sosial. Di mata para penganut pendekatan kultural

keresahan sosial merupakan gejala universal ditengah modernisasi. Tatkala modernitas semakin memberi peluang, bagi transformasi kultural, maka anggota masyarakat akan menjadi lebih berpengetahuan, sadar katub-katub partisipasi politik mulai terbuka sehingga keberanian masa untuk menunjukkan sikapnya semakin tinggi.

Terjadinya keresahan petani tentu memiliki perilaku kolektif (*kolektive behavior*). Menurut Anhar Gonggong (1992 :12) perilaku-perilaku kolektif bersifat relative, tidak tersusun, spontan dan emosional serta dalam suasana saling bertentangan. Perilaku kolektiv akan lahir didalam kelompok tertentu yang bersifat emosional. Hal ini terjadi apabila terdapat perasaan dari kelompok yang beranggapan bahwa sesuatu harus dikerjakan karena menyangkut isu atau permasalahan tertentu. Menurut Hoffer ada beberapa kelompok manusia yang sangat potensial dan mudah diajak untuk melakukan aksi sosial diantaranya adalah orang miskin, orang yang sedang frustasi, orang yang tidak puas, orang yang tersingkir, kelompok usia muda dan juga kelompok marginal ditengah masyarakat. (Hoffer, 1993 :26), hal ini juga terjadi pada petani di Boyolali dalam proses pelaksanaan reorganisasi tanah di Boyolali yang menimbulkan implikasi keresahan petani di pedesaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian historis (*historiografy*). Yaitu suatu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang sedang berlangsung masa lalu, selanjutnya kerap kali hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan masa yang akan datang. Metode historis dapat dilakukan dengan dua cara :

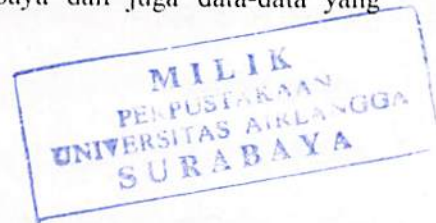
1. Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri terbatas dalam kurung waktu tertentu dimasa lalu.
2. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat.

Data masa lalu itu dipergunakan sebagai informasi untuk memperjelas suatu kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan dengan satu dengan yang lain. (Nawawi, 1995 : 79).

Data tidak sekedar diungkapkan dari sudut kepentingan sejarahnya akan tetapi untuk memahami berbagai aspek kehidupan masa lalu seperti adat istiadat, kebudayaan, struktur masyarakat dan pemerintahan, kehidupan sosial ekonomi dan lain-lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Boyolali-Surakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah Boyolali merupakan “*humi pangrambe*”, yang terletak di barat laut Surakarta, sebuah kabupaten yang subur tanahnya karena andapan vulkanis gunung merapi dan merupakan daerah inti pertanian di Surakarta yang dikenai reorganisasi tanah pada tahun 1920-an. Selain itu untuk menggali sumber-sumber penelitian disamping terjun kemasyarakat juga ditunjang dengan penelitian pustaka yang dilakukan di perpustakaan wilayah Surakarta-Jogjakarta-Surabaya dan juga data-data yang diambil dari kabupaten Boyolali.



3.3 Sumber-Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data primer dan sumber-sumber data sekunder. Karena validitas dan realibilitas hasil sangat ditentukan dari sumber datanya. Untuk itu data historis dapat diklasifikasikan :

- 1) *Data primer*, yaitu data autentik atau data dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Peneliti menggunakan data primer antara lain : Rijksblad soerakarta, Biwodonoto, Arsip keraton Surakarta dll.
- 2) *Data sekunder*, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan selanjutnya (Nawawi, 1995 : 80). Peneliti menggunakan data sekunder antara lain : buku-buku, majalah, surat-kabar dan terbitan berkala lainnya.

Penggunaan sumber data primer maupun sekunder bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang timbul dan cara pemecahannya sehingga tidak melenceng dari arah yang diharapkan dari peneliti. Bahan-bahan yang digunakan

dalam penelitian antara lain : arsip-arsip, buku-buku, majalah, surat kabar, penerbitan berkala dan lain-lain. Sebagai pembanding penulis mewawancarai pihak-pihak yang bisa memberikan keterangan dengan kriteria tertentu mengingat responden tidak lepas dari subyektifitas. Kemudian data diuji agar sesuai dengan permasalahan yang diteliti (Koencaraningrat, 1978 : 61).

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian historis atau *historiografy* yang bertujuan untuk mencari uraian yang menyeluruh dan cermat tentang salah satu keadaan. Setelah *mengumpulkan data-data dan mengklasifikasikan data primer-sekunder* maka tahap selanjutnya adalah tahap *analisa data*. Analisa data dalam penelitian historis juga disebut kritik data (*criticism of data*). Cara yang ditempuh dalam tahap ini yang pertama melakukan *kritik eksterm*, untuk mengetahui tingkat keaslian sumber data guna memperoleh keyakinan bahwa penelitian menggunakan sumber yang tepat. Mengecek apakah sumber data dapat kita pergunakan sebagai sumber bukti, oleh karena itu tugas peneliti menentukan apakah sumber data tersebut benar-benar sesuai dengan permasalahan yang diteliti disamping mengadakan kritik eksterm. Selanjutnya adalah melakukan *kritik intern*, yaitu kritik yang bertujuan untuk meneliti tingkat kebenaran isi (data) dan dari sumber data yang dipergunakan. Dengan kritik intern harus diterapkan apakah data itu dapat dipercaya kebenarannya dan ketelitiannya.

Setelah data dianalisa secara kritis sehingga diperoleh fakta. Fakta itu selanjutnya diseleksi dengan memberi atau mengurangi tekanan fakta yang ada hubungannya dengan penelitian. Selanjutnya fakta ditempatkan dalam urutan kausal sehingga dapat menggambarkan totalitas peristiwa yang objektif.

Selanjutnya dengan tahap-tahap yang akan diuraikan maka dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian *Legal Historis*. Yaitu penelitian yang bermaksud mengungkap kegiatan-kegiatan pemerintah, suatu bangsa, kerajaan, lembaga dalam menetapkan kebijaksanaan sehingga berpengaruh bagi kehidupan masa-masa tertentu dalam prospek sejarah. (Nawawi, 1995 : 8).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Faktor Penyebab Dilaksakannya Reorganisasi Tanah

Persolan tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Terlebih bagi penduduk Kasunanan Surakarta yang mendasarkan kehidupannya pada hasil pertanian. Tanah mempunyai arti khusus dalam masyarakat pedesaan karena keadaan kepemilikan tanah bukan hanya mempengaruhi keadaan ekonomi melainkan juga mempengaruhi sistem sosial, budaya dan politik. Stratifikasi sosial yang terdapat di dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan kepemilikan tanah (Purwanto, 1985 : 4). Begitu pentingnya masalah tanah bagi kehidupan manusia oleh karena itu perlu adanya peraturan yang mengatur penggunaan tanah, sehingga manusia mempunyai ketentrangan dan kepastian dalam menggunakan hak dan kewajibannya selama memanfaatkan tanah tersebut. Pola penguasaan tanah kasunanan Surakarta berada dalam kekuasaan Sunan. Anggapan bahwa raja sebagai pemilik tanah sudah berlangsung sejak adanya kekuasaan raja itu sendiri (Soetomo, 1927 : 5). Kemudian oleh Sunan tanah dibagi-bagikan kepada *sentono dalem* dan *abdi dalem* sebagai tanah lungguh. *Sentono dalem* sebagai pemegang tanah lungguh menyerahkan pengelolaan hasil produksi dan pemungutan pajak kepada para *hekel* (kepala desa). Sebagai imbalannya para *hekel* diberi tanah lungguh sendiri.

Hubungan sosial atas penguasaan tanah ini bersifat hirarkis, artinya kekuasaan yang berada diatas menuntut kesetiaan dan ketaatan dari pihak yang berada di bawah kekuasaannya. Hubungan seperti ini disebut hubungan *feodal*. Dalam penguasaan tanah secara tradisional ini para petani hanya sebagai penggarap tanah

di areal yang sudah ditentukan oleh para pemegang *lungguh*. Petani di Boyolali tidak memiliki hak milik atas tanah, yang dimiliki hanya kewajiban-kewajiban dalam hubungannya dalam pengelolaan tanah. Hak untuk menggarap tanahpun bukan merupakan hak bebas bagi petani melainkan dengan berbagai macam batas dan ketentuan yang ditentukan oleh pemegang *lungguh*. Tampaklah dalam hal ini pelaksanaan hubungan *patron-clien* yang tertuang dalam konsep *kawulo-gusti* (Murtono, 1985 : 17).

Wilayah kekuasaan Sunan terus berkurang dengan adanya perjanjian antara Sunan dengan pemerintah Gubernemen, pada waktu Sunan Paku Buwono X naik tahta. Hal itu merupakan taktik Belanda yang berusaha agar raja-raja pengganti Paku Buwono IX bersedia tunduk kepada pemerintah termasuk pembuatan-pembuatan peraturan baru.

Tanah kekuasaan Paku Buwono tersebut dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu, *tanah pangrambe* dan *tanah lungguh* wilayah tanah pangrambe terletak di barat laut Surakarta yaitu Boyolali dan Klaten, merupakan daerah subur karena endapan vulkanis gunung merapi dan menjadi inti pertanian di Surakarta (lihat peta 1 dan peta 2). Memasuki tahun 1920-an kasunanan Surakarta mengadakan perubahan mengenai tatanan tanah menyangkut kepemilikan dan penguasaan tanah di kasunanan. Peristiwa ini dalam sejarah kasunanan disebut *reorganisasi tanah*, istilah tersebut mempunyai arti perubahan status kepemilikan tanah dari milik Sunan, *Sentono Dalem* dan *Abdi Dalem* dialihkan kepada petani.

Munculnya peristiwa reorganisasi tanah dilatarbelakangi oleh dua kepentingan yang saling berbenturan antara Sunan Paku Buwono X sebagai penguasa wilayah kerajaan tradisional dengan penguasa pemerintah kolonial sebagai penguasa wilayah gubernemen. Kepentingan Sunan antara lain : (1) Ingin memperbaiki

keadaan perekonomian rakyat yang semakin merosot karena pengeksploitasian hasil bumi dan tenaga kerja oleh perkebunan Belanda dan kerajaan, berupa berbagai kerja wajib. (2) Ingin mengembalikan kewibawaannya sebagai *gusti* bagi *kawulonya*. Ketika sunan Paku Buwono X naik tahta (1893) telah membuat langkah yang keliru mau menanda tangani perjanjian dengan pemerintah gubernemen yang sangat merugikan rakyat. (lihat lampiran surat perjanjian). Reorganisasi tanah dijadikan sarana untuk melegitimasi rakyat supaya stabilitas raja sebagai penguasa dapat dipertahankan.

Di sisi lain kepentingan pemerintah Belanda adalah : (1) Ingin mensukseskan pelaksanaan politik kolonial liberal didaerah-daerah jajahan. (2) Ingin mengintensifkan eksploitasi dan pengkomersialisasi untuk memenuhi permintaan pasar internasional bagi hasil-hasil perkebunan, seperti indigo, tebu, kopi dan tembakau. (3) Mempermudah sewa menyewa tanah terhadap penduduk. Pada prinsipnya keinginan Belanda agar petani mempunyai kebebasan atas tanahnya tidak hanya ditanami tanaman pangan, tetapi juga disewakan kepada perusahaan perkebunan untuk ditanami tanaman ekspor. Petani bisa dimanfaatkan tenaganya pada perkebunan-perkebunan tersebut.

Sebenarnya gagasan pelaksanaan reorganisasi tanah bukan ide murni dari Sunan, namun merupakan prakarsa dari pemerintah Kolonial (NN, 1942 :48). Bukti dari semua itu ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh *patih* sebagai pelaksanaan harian kerajaan selalu atas musyawarah dan atas ijin Residen seperti kutipan di bawah ini :

“ Maniro pepatih Soerakarta kang wus kapasrahan penguwoso dalem...sarto wus saperembug kanjeng tuan residen ing soerakarta, pranatan ing ngigil punniko sampun mawi lilihun tuan gubernur ing soerakarta” . (Rijksblad Soerakarta, 1917 : 35).

Gagasan reorganisasi tanah ini pertama kali disampaikan oleh Residen Schneider sewaktu memerintah di Surakarta tahun 1905-1908 kepada Sunan. (Larson, 1990 : 28). Residen Schneider menyatakan betapa pentingnya reorganisasi tanah bagi kasunanan yang disesuaikan dengan kepentingan Belanda dalam proses sewa-menyewa tanah. Setahun kemudian Sunan pun menyetujuinya untuk selanjutnya rencana itu disampaikan kepada pemerintah Hindia-Belanda. Akhirnya tanggal 19 Januari 1909, Gubernur Jendral Van Heuz memerintahkan kepada direktur pemerintah dalam negeri S.de Graaf untuk membuat rencana reorganisasi di tanah Jawa.

Pada tanggal 20 November 1909, rencana itu dikirim kepada Residen Surakarta G.F Van Wijk (1909-1914) dan kepada Sunan. Sunan menghendaki agar tanah lungguh milik para *pangeran* dan *abdi dalem* untuk sementara tidak dihapus akan tetapi pemerintah Belanda menghendaki reorganisasi tanah tanpa terkecuali. Dengan tekanan Residen dan Direktur pemerintah S.de Graaf kepada Sunan maka baru pada tanggal, 31 Mei 1909, Sunan baru menyetujuinya. Maka sejak tahun 1911 dimulailah reorganisasi tanah hingga pada tahun 1939 (Radjiman, 1988 : 63). Atas dasar pemilikan status tanah pelaksanaan reorganisasi tanah dibagi dalam dua tahap. Untuk pelaksanaan di *tanah pangerambe* dimulai pada tahun 1912, sedangkan pelaksanaan di *tanah lungguh* dimulai pada tahun 1915, proses ini kira-kira berakhir pada tahun 1939.

Setiap pelaksanaan reorganisasi tanah baik di *tanah pangrambe* maupun di *tanah lungguh*, diangkatlah seorang pegawai *mantri pananggap arto* (mantri pemajakan), merupakan *abdi dalem* yang diberi tugas untuk menerima pajak dari desa-desa yang dikenai reorganisasi tanah. Pada awal pelaksanaan reorganisasi tanah *mantri penanggap arto* mempunyai tugas tidak hanya menerima pajak saja,

tetapi juga mengadakan pengukuran tanah, memeriksa patok dan batas pekarangan. Sebelum tahun 1915 *mantri penanggap arto* ini bergelar “*ngabehi*”. Namun sejak tahun 1915 ditentukan sebagai *abdi dalem* dengan sebutan *penewu kolektor* (Penyusun Buku Sejarah Hari Jadi Kabupaten Boyolali, 1992 : 25).

Dilaksanakannya reorganisasi tanah justru mengurangi kewibawaan Sunan sebab dengan reorganisasi tanah diperlukan pengangkatan para kepala desa untuk itu diperlukan perubahan administrasi dan keuangan yang memisahkan kas kerajaan dengan kas pribadi raja. Desa di bawah kekuasaan lurah yang dipilih oleh rakyat tetapi diangkat oleh Bupati dengan persetujuan Residen (Suhartono, 1991 : 95). Pemisahan administrasi seperti di atas mengakibatkan merosotnya kekuasaan raja dan semakin jauhnya hubungan rakyat dengan raja.

4.2 Pelaksanaan Reorganisasi Tanah di Boyolali

4.2.1 Pelaksanaan Reorganisasi.

Boyolali merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah kurang lebih 25 Km arah barat kota Surakarta. Merupakan daerah pertanian yang subur, masyarakatnya mempunyai corak sosial dan kultural yang berkembang sampai saat ini. Dilihat dari letak geografisnya Boyolali sangat strategis terletak pada jalan raya yang menghubungkan kota Surakarta dengan kota Semarang, sebagian besar wilayahnya terletak di kaki gunung Merapi dan Merbabu, sehingga sangat potensial untuk usaha pertanian dan perkebunan. Daerah Boyolali dahulu merupakan daerah *swapraja* Surakarta dan menjadi daerah inti pertanian di Surakarta karena kesuburan tanahnya. Tanah yang subur merupakan endapan lumpur yang dimuntahkan oleh gunung Merapi, abunya banyak mengandung mineral endesit, andesolo dan grumesolo yang sangat baik untuk pertanian.

Sebagian besar permukaannya terdiri dari vulkanis muda sehingga sangat menaruh minat penguasa asing untuk mengusahakan perkebunan di Boyolali. (Sasongko Triyogo, 1991 : 31). Akhirnya Belanda mendesak Sunan untuk segera melaksanakan reorganisasi tanah di Boyolali. Sebelum reorganisasi tanah dilaksanakan, tanah Boyolali berstatus sebagai *Kabupaten Gunung Polisi*. Yang merupakan perbatasan *negoro agung*. Disebut Kabupaten Gunung Polisi karena dipinpin oleh *Bupati Gunung Polisi* yang mempunyai tugas menangani masalah kepolisian dan berada di bawah kuasa *patih dalem*. Juga bertugas menjaga ketertiban dan keamanan daerah, mengurus masalah kemakmuran penduduk, kesehatan, pertanian, peternakan dan kelancaran lalu-lintas.

Wilayah Kabupaten Gunung Polisi meliputi lima distrik yang dipinpin oleh Penewu. Wilayah tersebut :

- 1) *Kapenewon distrik kota Boyolali* yang terdiri; Boyolali, Musuk, Mojosongo, Teras, Banyudono dan Sawit
- 2) *Kapenewon distrik ampel* terdiri dari ; Ampel, Malambong, Cepogo, dan Selo
- 3) *Kapenewon distrik Simo* yang terdiri dari ; Simo, Sambu, dan Tari
- 4) *Kapenewon distrik Karanggede* yang terdiri dari ; Karanggede, Klego dan Andong
- 5) *Kapenewon distrik Wonosegoro* yang terdiri dari ; Wonosegoro, Rupaing, Juwangi dan Kemusu.

Reorganisasi tanah adalah perubahan status hak milik tanah secara perseorangan di daerah *negoro agung* kepada penduduknya dan menyangkut pembentukan atas pemerintah desa. Perubahan itu tidak serentak, tetapi setiap perubahan di daerah tersebut diangkat seorang *abdi dalem mantri penanggap arto* (mantri perpajakan). Pelaksanaan reorganisasi tanah di Boyolali dimulai pada

tahun 1912. Pada tahun 1912 telah dibuka mantri penaggap arto di Sendang wilayah Kareng gede yang dipinpin oleh *MNg.Yososuharto*, tahun 1913 dibuka lagi mantri penaggap arto di Kacangan, dipinpin *Mng.Rono Hartono*. Pada tahun 1915 dibuka lagi mantri penaggap arto di Juwangi, dipinpin oleh *MNg.Harto Sudiro*.

Untuk pelaksanaan reorganisasi tanah di daerah-daerah lain dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan pelaksanaan reorganisasi tanah maka hak milik atas tanah secara perscorangan diakui. Dengan adanya campur tangan Belanda, maka di daerah Boyolali terjadi perubahan status pemerintahan. Kabupaten Boyolali yang dulu sebagai *Kabupaten Gunung Polisi* di bawah patih Surakarta, sejak tanggal 12 oktober 1918, maka menjadi *Kabupaten Pangrehprojo* seperti bunyi pranatan :

“poro *ahdi dalem, wedono, kaliwon, penewu, mantri sa panunggalanne* kang saiki kaaranan *golongan polisi*, nanging kang kawajibane ugo nindhake babagan paprintahan iku ing sumengko kang salinan aran *ahdi dalem pangreh projo*”. (Rijksblad Soerakarta, 1918 :23).

Dengan adanya pranatan tersebut, *Kabupaten Gunung Polisi Boyolali* namanya menjadi *Kabupaten Pangreh Projo Boyolali*, dengan struktur pemerintahan : Bupati Pangreh Projo, Bupati Anom Pangreh Projo, Wedono dan Asisten Wedono. Tugas para pejabat tersebut antara lain memelihara ketentraman, kesehatan, keselamatan, pertanian, kelancaran lalu-lintas dan memberi penyuluhan kepada masyarakat.

Terjadi proses transisi dari sistem pemerintahan tradisional ke sistem kolonial. Sistem yang mendasarkan kepada hubungan *patron-clien* ke sistem kolonial yang bersifat legal, rasional dan modern. Perubahan ini sebenarnya bertujuan untuk menjauhkan hubungan *ahdi dalem* dengan rakyat. Bupati langsung di bawah

Residen, dengan demikian semuanya berada di bawah pengawasan Gubernur. Pembentukan pemerintahan desa ataupun pembagian wilayah Kabupaten Pangreh Projo Boyolali dapat dilihat dalam lampiran.

4.2.2 Akibat Pelaksanaan Reorganisasi Tanah.

Akibat reorganisasi tanah ini menyangkut berbagai segi, baik ekonomi politik maupun sosial antara lain : (1). Terhentuknya petani pemilik tanah sehingga hak atas tanah bagi para petani setelah reorganisasi tanah yaitu : (a). *hak pakai turun-temurun*. Tanah yang diberikan kepada desa, pengelolaannya diserahkan kepada kepala desa sebagai hak milik komunal, kemudian tanah itu dibagi-bagikan kepada penduduk desa untuk dipakai secara turun-temurun. (b). *hak mewariskan*. Pemberian wewenang atas tanah kepada penduduk desa sebagai hak pakai turun-temurun, maka para petani mempunyai hak mewariskan kepada anaknya sebagai ahli waris apabila meninggal dunia. Keturunan yang berhak menerima warisan adalah anak yang belum memiliki tanah garapan. Seperti kutipan :

“manowo kang ngaduh palemah duwe wewenang nganggo turun-temurun tinggal donyo, iku wewenange gumanti marang warise kang miturut panemuning desa wajib ngganteni, ananging kang keno angganteni mau angemungake kang durung duwe sesanggan bumi gawe. (Rijksblad Soerakarta, 1938 : 10).

(c). *hak menggadaikan*. Penggadaian tanah garapan diperkenankan jika keadaan benar-benar mengharuskan untuk menggadaikannya. Tanah hanya boleh digadaikan kepada penduduk Kasunanan yang telah lama tinggal dan hidup lama di desanya dan harus dengan persetujuan desanya. (d). *hak menyewakan*. Hak menyewakan ini di bagi menjadi dua, pertama menyewakan kepada orang lain

baik kepada penduduk desa Kasunanan maupun kepada orang lain yang diatur demikian : “ bumi gawe desa keno kasewakake marang sadengah kawulo dalem, lawas-lawase 5 taun dene lakune manut tata carane desa kono “. (Rijsblad Soerakarta, 1938 : 10, bab 15).

Kedua menyewakan kepada perusahaan perkebunan. Dengan adanya hak milik atas tanah tersebut, petani memiliki kebebasan atas tanahnya sehingga tidak hanya ditanami tanaman pangan saja tetapi juga disewakan kepada pengusaha perkebunan, yang oleh Suhartono dikatakan tercipta *liberalisasi tanah* (Suhartono, 1991:97).

(2). *Tumbuhnya perkebunan di Boyolali*. Para pengusaha perkebunan sangat menaruh perhatian kepada mutu tanah dalam pertimbangan untuk lahan perkebunan. Sedangkan dari segi iklim, dalam keadaan normal, musim penghujan berlangsung pada bulan November sampai bulan Mei tahun berikutnya. Kemudian musim kemarau berlangsung antara bulan Juli sampai bulan September. Musim kemarau diawali dengan *mongso mareng* selama satu bulan dan jatuh pada bulan Juni diakhiri dengan *mongso labuh* selama satu bulan yang jatuh pada bulan Oktober.

Bukan secara kebetulan apabila para pengusaha perkebunan swasta mengarahkan pandangannya ke daerah Boyolali yang dahulu merupakan daerah inti pertanian Surakarta. Boyolali secara geologis mendukung dalam usaha-usaha perkebunan karena bahan-bahan vulkanis gunung Merapi dan Merbabu yang merupakan unsur kesuburan tanah di lereng-lerengnya. Sangat baik untuk dijadikan perkebunan kopi, tembakau, dan lain-lainnya. Debu vulkanis yang terbawa oleh sungai yang mengalir ke daerah yang lebih rendah mendukung mutu



tanah diperkebunan tebu, serat, dan tembakau. (Sasongko Triyogo, 1991:31). Satu hal lagi yang menjadi pertimbangan pemilihan lokasi perkebunan di Boyolali adalah tinggi tempat karena berhubungan dengan suhu udara untuk menentukan jenis tanaman yang cocok pada suatu ketinggian tertentu. Boyolali mempunyai ketinggian rata-rata antara 200 meter sampai 1500 meter dari permukaan laut.

Tabel 1. Penyebaran Ketinggian Tempat dan Jenis Tanaman di Boyolali

Ketinggian (H)	Lokasi	Jenis Tanaman
100 – 400	Teras	Tebu, tembakau
	Banyudono	Tebu, tembakau
	Simo	Karet
400 – 700	Boyolali	Serat nanas
	Musuk	Kopi, teh, dan serat nanas
700 – 1000	Cepogo	Teh, kopi
	Ampel	Teh
1000 – 1300	Selo	

Sumber : Bundel Agraria, reorganisasi kantor agrarischezaken, Soerakarta 1930 (dalam arsip Kraton Surakarta kode P. 1960)

Setelah dilaksanakan reorganisasi tanah di Boyolali tanah sewaan yang diperoleh dijadikan perkebunan. Perlu diketahui perkebunan yang berada didaerah Boyolali dibedakan atas tiga jenis yaitu : (a) menurut pemiliknya adalah perusahaan perkebunan partikelir, perusahaan perkebunan Kasunanan dan Mangkunegaran. (b) menurut sifatnya yaitu perusahaan perkebunan yang bergantian antara tebu - tembakau dan perusahaan tanaman keras seperti kopi, teh, serat nanas dan karet. (c) menurut hak konversi yang dimilikinya perkebunan dibedakan menjadi perusahaan perkebunan tebu, perusahaan perkebunan tembakau dan perusahaan tanaman keras. (Panitia Penyusunan Sejarah Hari Jadi Kabupaten Boyolali, 1985 : 32).

Berikut ini adalah perkebunan yang terdapat di daerah Boyolali : (a). wilayah *onder distrik* Musuk. Merupakan perkebunan teh milik Inggris lalu dijual kepada pihak Belanda. Di Borosampir merupakan perkebunan kopi, di Sokorame merupakan perkebunan tebu yang hasilnya dikirim ke pabrik Delanggu. Perkebunan ini akhirnya diganti menjadi perkebunan serat nanas karena rakyat tidak mau menyewakan tanahnya lagi. (b). wilayah *onder distrik* Cepogo, merupakan perkebunan teh dan kopi milik penguasa Belgia, kemudian dijual kepada pemerintah Belanda. (c). wilayah *onder distrik* Ampel, merupakan perkebunan teh milik Sunan Paku Buwono X, teh tersebut diproduksi di Malambong terkenal dengan nama '*teh Ngampel*'. Buruh di perkebunan teh ini senang karena Sunan sering meninjau ke perkebunan tersebut. (d). wilayah *onder distrik* Banyudono, merupakan perkebunan tebu milik Inggris yang kemudian jatuh ketangan Belanda, hasilnya dikirim ke pabrik Delanggu. (e). wilayah *onder distrik* Simo, merupakan perkebunan karet milik Belanda. (f). wilayah *onder distrik* Tlatar dan Karanggeneng merupakan perkebunan serat nanas. (lihat lampiran Peta Penyebaran Perkebunan di Boyolali).

Masalah yang berkaitan erat dengan berlangsungnya perkebunan adalah bagaimana mendapatkan tanah dan mendapatkan tenaga kerja. Sistem sewa tanah yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) *Sistem glehakan*, sistem ini dipakai oleh perkebunan tembakau, nila dan tebu. Caranya adalah seperlima tanah yang tidak dibebani pajak untuk para bekel, empat perlima tanah lainnya dibagi menjadi dua yang separuh ditanami padi atau palawija separuh tanah yang lainnya ditanami tebu, nila, tembakau, atau tanaman lain yang dikehendaki oleh perusahaan dengan tenaga dari rakyat desa.

- 2) *Sistem bengkok*, sistem bengkok artinya memiliki tanah secara tetap, tanah bengkok yang terdapat dimana orang Eropa menyewa untuk tanaman kopi, teh dan coklat.
- 3) *Sistem glidik*, sistem ini merupakan pelengkap dari dua sistem diatas dan tidak berdiri sendiri. Setelah reorganisasi tanah sistem tersebut mengalami perubahan yang dikenal dengan *sistem wolak-walik*. Caranya yaitu sesudah masa tanam *tanaman musiman* (tembakau) berakhir maka masa tanam berikutnya adalah tanaman pangan. Jadi *sistem wolak-walik* ini khusus untuk *tanaman musiman*

Mengenai tenaga kerja di lapangan, Belanda memperoleh tenaga kerja dengan cara menekan Bupati untuk memerintah lurah bawahannya yang tanahnya dikehendaki perusahaan agar rakyat merelakan tanahnya untuk disewakan dan di gunakan tenaganya. Tindakan tersebut merupakan salah satu cara campur tangan pemerintah dalam ikatan desa. Campur tangan tersebut biasanya disertai dengan ancaman akan "*dicopot*" (di pecat dengan tidak hormat) dari kedudukannya sebagai lurah, sebab Bupati sendiri juga mengalami ancaman yang serupa apabila tidak berhasil memerintah bawahannya. Demikian pula cara yang diperoleh untuk mendapatkan tenaga kerja perkebunan. Para pekerja akan diperkerjakan di perkebunan, selain itu juga dibebani kerja ekstra yaitu *heerendiensten*, suatu kerja bakti membersihkan jalan, komplek sinderan, jalan rel dengan tanpa upah.

(3). *Terjadi marginalisasi kaum miskin desa*. Petani telah kehilangan tanah garapannya karena disewa pengusaha asing sehingga mereka menjadi buruh perkebunan dengan upah uang. Masuknya ekonomi uang ke desa-desa menyebabkan penduduk menghargai segala sesuatu dengan uang. Pola pikir petani cenderung komersial sebagai mana layaknya masyarakat pinggiran kota. Banyak

tugas yang dahulu merupakan bagian kerja wajib dapat dibayar dengan uang oleh para petani pemilik tanah. Pengaruh *moneterisasi* yang terjadi telah meresap ke masyarakat pedesaan. Keseimbangan konsumsi tenaga kerja tidak dapat dipertahankan sehingga petani menjual tenaganya. Kerja upah menyebabkan desa-desa terbuka terhadap lalu-lintas uang. Pengaruh itu tidak mensejahterakan petani karena sumber daya pedesaan di eksploitasi untuk keuntungan perusahaan. Masuknya sistem ekonomi uang memperkenalkan petani kepada barang-barang impor yang sengaja di masukkan oleh Belanda melalui pedagang *Cina kelontong* ke desa-desa. Tujuan memasukkan barang-barang tersebut untuk menarik kembali uang yang telah beredar di pedesaan akibat yang ditimbulkannya adalah penduduk desa terjerat pada pola hidup konsumtif yang menjurus kepada *konsumerisme*. Sistem ekonomi uang secara langsung, maupun tidak langsung merangsang masyarakat kepada kehidupan mewah sehingga pembelanjaan rakyat naik. (Kartodirdjo, 1991 : 80). Petani dibanjiri barang-barang mewah antara lain : candu, mangkok, piring dari Tiongkok dan barang-barang lain yang tergolong mewah. Akibatnya petani di perkebunan-perkebunan Boyolali senang sekali "*nyeret*" (kebiasaan menghisap candu). Selain candu kesukaan petani terhadap barang mewah yaitu mengumpulkan piring dan mangkok yang ber cap *Sanghai*. Disamping itu juga dandang yang terbuat dari tembaga. Padahal untuk makan saja masih kekurangan. Petani meminjam uang di pegadaian Surakarta, juga para rentenir pedesaan.

4.3 Keresahan Petani Di Boyolali

4.3.1 Faktor Penyebab Merosotnya Kondisi sosial Ekonomi Masyarakat Boyolali

Desa, petani dan permasalahannya adalah sumber-sumber penelitian yang tidak pernah habis digali. Berbicara mengenai petani tentu akan membayangkan kelompok masyarakat komunal, terbelakang dan hidup di lingkungan lahan pertanian. Terikat dengan sistem kepercayaan yang kadang-kadang tidak rasional, bodoh dan sulit menerima sesuatu yang baru. Petani mempunyai sifat ekonomi *subsisten* dan terikat oleh penguasa di atasnya. (Scott, 1983 :19).

Petani adalah penduduk yang secara eksistensialnya terlibat dalam proses cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam. Kategori ini mencakup penggarapan atau penerima bagi hasil, maupun pemilik penggarap selama mereka berada dalam posisi membuat keputusan yang relevan dengan bagaimana pertumbuhan tanaman mereka. Tahun 1911 dengan persetujuan Kasunanan Surakarta mengadakan perubahan mengenai status tanah yang menyangkut pemilikan dan penguasaan tanah. Keadaan yang sejak dahulu ada dan yang berlaku di Surakarta itu mempengaruhi kehidupan petani di Boyolali.

Dengan diadakannya reorganisasi tanah di Boyolali, petani Boyolali kehilangan peran dan senantiasa menghadapi kendala yang terpola pada kekurangan tanah garapan bagi usaha pertanian dan kekurangan uang, sehingga daya beli masyarakat yang semakin merosot antara lain di sebabkan :

- (1). Ketimpangan pelaksanaan Undang-Undang Agraria 1870 di bumi Pangrambe Boyolali. Reorganisasi tanah menghasilkan peraturan baru yang

menyangkut masalah kepemilikan tanah dan tata cara pemindahan hak milik atas tanah dari seorang petani ke pihak lain. Tanah yang semula diatur berdasarkan sistem *apanage*, di ubah dasar penguasaannya menjadi tanah yang diberikan kepada desa sebagai milik komunal.

Adanya tatanan reorganisasi tanah tersebut dimanfaatkan oleh Gubernur untuk melaksanakan *AgrarischeWet di vorstenlanden*. Dalam undang-undang agraria 1870 menyebutkan ketentuan bahwa penyewaan tanah milik petani oleh pengusaha perkebunan adalah dalam waktu 5 tahun dan di larang mengambil alih tanah pribumi. (Kartodidjo, 1991 : 80). Naiknya permintaan pasar internasional bagi hasil-hasil perkebunan mendorong Belanda memperluas penyewaan tanah sehingga terjadi penyimpangan dari pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang agraria. Dengan dalih apapun Belanda berusaha mendapatkan areal perkebunan. Tata cara memperoleh tanah menurut pranatan pada akhirnya dilanggar, rakyat dipaksa untuk menjual tanahnya. Sehingga pada tahun 1919-1920 seluruh perkebunan kopi di Sukabumi, Cepogo jatuh ke tangan pengusaha Belanda secara paksa. Petani hampir tidak mempunyai tanah lagi kecuali yang menjadi tempat tinggalnya. Perusahaan perkebunan hanya menyisakan beberapa orang penduduk saja yang tanahnya agak luas, yang oleh penduduk setempat di panggil dengan sebutan "*ndoro mantri*". (wawancara dengan Harjo Ramli, 20 November 1999).

Keadaan tersebut diatas mendorong petani untuk melepaskan atau menjual tanahnya terutama di daerah perkebunan seperti di Cepogo, Boyolali, Bangak dan Banyudono. Petani tidak punya waktu untuk menggarap tanahnya yang tersisa, mereka lebih suka menjadi buruh perkebunan di perkebunan kopi di Cepogo, perkebunan tembakau di Banyudono dan perkebunan tebu di Bangak.

(2). Berbagai jenis beban pajak dan kerja wajib di Boyolali. Adanya berbagai macam pajak ini juga mempengaruhi berkurangnya uang pada masyarakat. Pajak yang dibebankan pada petani antara lain : (a). *pajak bumi*, ialah pajak yang dibebankan kepada petani atas semua tanah pekarangan, sawah, tegalan dan perumahan. Pajak ini hanya dibebankan kepada petani, sedangkan lurah dan bawahannya yang memiliki tanah yang lebih luas tidak dibebani pajak. Raja menerima pajak petani sebagai upeti dan memanfaatkan tenaga petani untuk pembangunan dan pemeliharaan istana, jalan raya, irigasi dan lain-lain. (Frederick dan Soeri Soeroto, 1984 : 229). (b). *pajak pangautan* (pegawaian). Yaitu merupakan pajak dalam bentuk tenaga kerja yang berupa kerja wajib. Kerja wajib ini justru dirasakan berat karena sebagian waktunya habis untuk kerja wajib, maka upah buruh perkebunan yang di terima semakin kecil. Kerja wajib yang menjadi beban petani antara lain :

- a. *Kerja wajib untuk Sunan*, kerja wajib yang dikerjakan di perkebunan milik Sunan yang disebut *Intiran*.
- b. *Kerja wajib untuk negara*, yaitu kerja wajib untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi dan lain-lain yang disebut *kerigaji*.
- c. *Kerja wajib untuk kelurahan desa*, yaitu untuk memperbaiki jalan desa, pematang sawah, perbaikan infra struktur desa akibat banjir dan gangguan alam yang disebut *kerigan* (gugur gunung).

Pemerintah Belanda juga menentukan bahwa pajak tanah harus di bayar dengan kerja bakti di perkebunan-perkebunannya sehingga mereka tidak mendapat upah pekerjaan, sistem yang demikian mempengaruhi kehidupan perekonomian petani.

(3). *Berbagai macam upacara adat*. Wilayah Boyolali kental dan terikat adat Jawa, para petani menganut kepercayaan seputar hubungan *makrokosmos* dan *mikrokosmos*. Petani sangat memerlukan suasana harmonis antara alam yang diolah dengan dirinya sebagai subyek dalam lingkaran sistem bercocok tanam. Adapun upacara yang berlaku dalam lingkaran sistem cocok tanam ialah :

- a. *Merti desa*, merti desa atau bersih desa di lakukan menjelang musim tanam padi. Didalam melaksanakan upacara bersih desa juga masih mengadakan tayuban atau wayangan.
- b. *Upacara wiwit*, di lakukan untuk mengawali masa panen padi yang bertujuan menghormati dewi Sri
- c. *Upacara selamatan*, upacara yang berhubungan dengan kelahiran, khitanan, kematian maupun peringatan hari-hari besar agama.

(4). *Masuknya sistem mindring*, sistem mindring adalah menjual barang-barang dengan mengangsur yang dilakukan oleh Cina kelontong. Mereka menjajakan barang dagangannya ke pelosok-pelosok desa maka banyak barang-barang impor ke pedesaan seperti candu, piring, mangkok, kain sutra, dan lain-lain yang merupakan barang mewah bagi ukuran rakyat desa, selain itu pedagang Cina juga melakukan pembelian produksi tanaman dengan *ngijo*. Petani tidak dapat menghindari sistem ini karena setiap kali membutuhkan uang mereka menjualnya kepada pedagang Cina. Pada waktu paceklik di-juallah kembali pada petani dengan harga yang berlipat sehingga keuntungan jatuh kepada pedagang Cina. Pedagang Cina kelontong memainkan peran sebagai kelas menengah dalam struktur masyarakat yang menjembatani pemerintah Gubernur, pemerintah Kasunanan dengan rakyatnya. Cocok dengan apa yang dikatakan oleh Boeke dan

Burger, yang mengamati pedesaan Jawa, bahwa tahun-tahun sebelum Perang Dunia I terjadi depresi ekonomi tahun 1929-1930. Burger, 1962 : 78).

4.3.2 Keresahan Petani di Boyolali

Tidak dapat disangkal bahwa dominasi kolonial beserta perubahan-perubahan sosial yang mengikutinya telah menciptakan kondisi yang meresahkan masyarakat Boyolali. Dominasi politik, ekonomi dan kultural yang terjadi pada masa kolonial mengakibatkan timbulnya *diferensi struktural* dalam masyarakat serta menimbulkan *disorganisasi* dalam masyarakat tradisional beserta lembaga-lembaganya. Dengan adanya industri pertanian maka timbul pula peranan-peranan sosial baru yang didapat dengan cara yang sama sekali berbeda dengan peranan sosial tradisional!. Memudarnya peran priayi istana sebagai *penguasa feodal*, mereka bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai penerima gaji dari pemerintah. Lembaga-lembaga tradisional telah dirusak, salah satunya para pejabat desa bekerja selaku instrumen dari penguasa kolonial. (Bremen, 1986 : 185). Terganggunya keseimbangan masyarakat tradisional, telah menimbulkan frustrasi dan rasa tersingkir, perasaan itu lalu berkembang menjadi keresahan sosial di Boyolali.

Situasi tegang dan gelisah menyelimuti para petani diperkebunan-perkebunan Boyolali, karena mendapat tekanan dari penguasa atasannya, juga rasa tidak tentram telah menyertainya karena mereka tidak leluasa lagi dalam mengolah tanahnya. Para petani di perkebunan kopi Sukabumi, Cepogo, perkebunan tebu di Bangak dan Banyudono, perkebunan teh di Nganggrong, Ampel mulai terusik ketentramannya. Siklus kehidupan tradisional menjadi terganggu, waktu yang seharusnya disediakan untuk menggarap sawah dan ladangnya habis untuk bekerja

di perkebunan, sementara upah yang diterima sangat minim. Dalam kondisi hidup yang serba pas-pasan orang hendak menghibur diri dengan berjudi, menghisap candu, kesemua itu menjerumuskan ke dalam hutang, kemerosotan kesehatan dan kesejahteraan. (Kartodirdjo, 1984 :151).

Keresahan petani di daerah Boyolali semakin meningkat ketika mereka dipaksa menanam tanaman kopi, petani memprotes tindakan pemerintah Gubernemen dengan mengadakan aksi mogok dan mencabuti bibit kopi tersebut. Keresahan juga terjadi di perkebunan tebu di Bangak dan Banyudono, para petani mengadakan pembakaran dan penyerangan terhadap mandor. Terlihat dalam menghadapi pengaruh *pnetrasi barat* yang memiliki kekuatan *disintegratif*, masyarakat mempunyai cara tersendiri untuk membuat reaksi, salah satunya dengan cara gerakan sosial sebagai protes sosial yang sering digolongkan sebagai sebutan gangguan ketentraman, huru-hara, kerusuhan atau gerakan rohani. Secara umum penyebab gerakan sosial di Boyolali antara lain : (1). *Adanya penetrasi sistem pemerintah kolonial yang legal rasional* serta terdesaknya sistem pemerintah tradisional yang mengakibatkan merosotnya kedudukan penguasa tradisional yang pada gilirannya menimbulkan ketegangan dan pertentangan. (Djokosuryo, 1985 : 17). Hubungan *abdi dalem* dan rakyat semakin jauh, para Bupati langsung di bawah pengawasan Residen. Pada gilirannya *prestise* para priayi semakin merosot ditambah perusahaan Belanda mengadakan kontrak-kontrak langsung dengan lurah, berarti melangkahi para Bupati. Dengan demikian para priayi telah kehilangan sebagian besar hak-haknya sebagai kepala pemerintahan setempat. (2). *Adanya sistem sewa paksa dan tanam paksa* diperkebunan kopi dan teh di Boyolali. Pemerintah Belanda bukan sekedar menyewa tanah petani dengan paksa, tetapi juga memaksa petani untuk menanam

tanaman sesuai dengan selera Belanda. Rakyat tidak berhak menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah Kolonial tidak mencegah berkembangnya hutang di desa-desa malah membawa kemerosotan standar hidup kaum petani. Akibat dari sewa paksa dan tanam paksa di perkebunan Boyolali menyebabkan kehidupan petani tertekan dan terdesak. Gagasan tentang petani merdeka yang membuat keputusan sendiri tentang waktu penanaman, jenis yang akan ditanam sama sekali hanya hayalan belaka. (Bremen, 1986 : 80).

Menghadapi situasi seperti itu para petani Boyolali tidak tinggal diam. Pada waktu pemerintah Gubernemen melaksanakan sewa dan tanam paksa mereka bergerak menentang kebijakan tersebut dengan mengadakan aksi protes. Awal tahun 1920 perkebunan tebu di Sukorame dirusak dan terpaksa diganti menjadi perkebunan serat nanas, karena mereka menolak menyerahkan tanahnya untuk disewa. (Wawancara dengan Sulaiman Harjo wiriyono, 22 November 1999). Dengan semangat patriotik para petani mengadakan aksi mogok dan duduk di kantor kontroleur, karena tanahnya disewa dengan paksa, mereka diwajibkan menanam teh, kopi dan tembakau. Petani menuntut ganti rugi sewa tanah dan upah tenaga kerjanya karena yang diterima tidak layak. Gerakan protes bisa reda setelah Bupati Boyolali R.T Mertonegoro atas permintaan Gubernemen untuk turun tangan. Akhirnya petani mau menuruti perintah Bupati Boyolali, hal ini menunjukkan bahwa rakyat lebih tunduk kepada penguasa pribumi dari pada penguasa asing.

Gerakan protes muncul lagi ketika para petani di Sukabumi, Cepogo dipaksa untuk menanam tanaman kopi, tembakau, dan teh. Para petani mengadakan aksi mencabuti bibit-bibit kopi. Namun menghadapi keadaan protes para petani tersebut, Belanda menuduh Bupati R.T Mertonegoro sebagai dalang protes sosial

di Boyolali. (Panitia Penyusun Sejarah Hari Jadi Kabupaten Boyolali, 1992 : 32). Pemerintah Belanda meminta kepada Sunan untuk memecat Bupati tersebut. Tetapi karena alasan dan bukti yang kurang kuat Sunan tidak mau. Karena rasa benci terhadap sikap Belanda tersebut Bupati R.T Mertonegoro meminta berhenti dari jabatannya. Kebencian itu diwujudkan juga dengan melarang cucu-cucunya sekolah di HIS Belanda. Campur tangan pemerintah Belanda di Boyolali menimbulkan keresahan pada masyarakat di Boyolali, mereka menjadi lebih radikal setelah adanya pengaruh partai politik di Boyolali.

4.3.3 Gerakan Radikal Petani Boyolali

Menurut Sartono Kartodirdjo, *gerakan radikal petani* adalah gerakan sosial petani yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang berlaku, ditandai dengan kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang mempunyai hak yang istimewa dan yang berkuasa. (Larson, 1990 : 197). Militansi gerakan sosial berpengaruh terhadap daerah pedesaan terutama di daerah yang dikuasai perkebunan tebu. Masuknya kekuatan-kekuatan partai politik di pedesaan telah menggoncang dikotomi tradisional antara desa dengan supradesa, antara petani dan priayi. (Kuntowijoyo, 1993 : 3).

Partai Serikat Islam telah mengidealisasi di desa-desa Boyolali. Masuknya partai ini tidak lepas dari peran dua tokoh insulinde cabang Solo yaitu, Haji Misbach dan Dr. Tjiptomangunkusumo. Keduanya sangat rajin dan bersemangat dalam melancarkan propaganda untuk menentang Gubernur, Kasunanan dan perkebunan asing, yang memancing kerusuhan dan huru-hara di pedesaan yang terkena peraturan reorganisasi.

Pertengahan tahun 1920 merupakan masa sulit di pedesaan, biaya kebutuhan hidup naik sedangkan upah buruh tetap. Terjadi kemelaratan dan kemerosotan standar hidup di pedesaan akibat kesulitan hidup ekonomi. Juga dikabarkan telah terjadi wabah pes di Boyolali, dalam seminggu telah terjadi 180 kematian. Paham komunis mulai masuk ke pedesaan Boyolali melalui organisasi *Serikat Islam Abangan* yang didirikan Haji Misbach, Mangoen Admojo dan Haji Bakri pada bulan September 1919, di distrik Ponggok. Pada sebuah rapat tanggal 2 Mei 1920 di desa Kateguhan, subdistrik Sawit, Haji Misbach menjelaskan arti kata Islam Abangan. "Islam" diartikan sebagai prajurit, sedangkan "Abangan" berarti bendera merah oleh karena itu Islam Abangan berarti prajurit yang berani. (Larson, 1990 :176). Organisasi yang tergabung dalam Serikat Islam Merah berusaha menggagalkan reorganisasi tanah dan mempertahankan komunalisasi tanah dengan harapan dapat dimanfaatkan penduduk desa secara bergilir.

Mereka juga mendesak penduduk desa agar tidak melakukan kerja paksa apabila terlalu berat dan upahnya terlalu rendah. Oleh karena itu organisasi Serikat Islam Merah mendapat tempat di pedesaan Banyodono. Ini dimungkinkan karena suasana yang kacau dan belum mapan akibat reorganisasi tanah. Rakyat menjadi kesal karena hubungan tradisional *patron-clien* mereka terputus. Karena propaganda dan hasutan yang dilakukan Haji Misbach ia ditangkap pada tahun 1924 dan dibuang ke Manukwari, Irian Jaya sampai meninggal dunia, 1926.

Perjuangannya diteruskan oleh teman-temannya dan terus mengadakan kampanye memupuk persatuan kelompok revolusioner. Organisasi tersebut mendapat tempat di hati petani miskin di Boyolali. Organisasi tersebut menjadikan daerah perkebunan Boyolali sebagai ajang kerusuhan dan penggagalan reorganisasi tanah. Dua peristiwa yang patut dicatat ialah kerusuhan

di Sawahan dan kerusuhan di perkebunan tebu, di Banyudono dan Mojolegi, Teras.

(a). Kasus Sawahan. Pada tanggal 4 Desember 1926, kira-kira jam 00.30 malam sebuah gerombolan yang terdiri dari 300-400 orang dengan senjata tajam, yang sebagian besar adalah anggota Serikat Tani telah menyerbu penewu di Sawahan, yang terletak kira-kira 8 Km arah Boyolali. (Larson, 1990 : 212). Rencana tersebut tercium aparat kepolisian sehingga polisi yang sudah siap sebelumnya berhasil mengusir gerombolan tersebut. Salah seorang penyerang meninggal dunia dan lima orang lainnya luka-luka. Insiden itu menghasilkan 128 penangkapan yang sebagian besar adalah para santri yang telah dihasut oleh Amat Semangil. Seorang tokoh gerombolan adalah ketua Serikat Tani lokal dan pemimpin Lingkar yang telah dipecat sebagai Bekel. Alasan para gerombolan, penewu terlalu kejam terhadap rakyat dan sewenang-wenang selama reorganisasi tanah.

(b). Kerusuhan di perkebunan tebu di Banyudono dan Mojolegi, Teras. Dimulai ketika pada bulan April, Wirosumarto, mantan pemimpin Serikat Rakyat menyebarkan doktrin bahwa ratu adil akan datang mengusir orang-orang Eropa pada tahun 1935. seorang raja akan muncul mendirikan pemerintahan baru dan adil. Propaganda tersebut mendapat banyak pengikut di perkebunan tebu di Banyudono. Mereka dikursus kilat untuk mempersiapkan setiap gerakan. Tepat pada tanggal 6 Mei 1936, mereka mengadakan kerusuhan di perkebunan tebu di Banyudono dengan aksi menolak sewa dan kerja paksa sebelum dipenuhi kenaikan upahnya. Aksi meningkat dengan mengadakan penyerangan dan berhasil melukai seorang sinder perkebunan. Kerusuhan tersebut akhirnya dapat diatasi oleh para polisi yang telah dikirim, gerakan mereka digagalkan dan banyak anggotanya yang ditangkap.

Gerakan petani tetap muncul dengan ramalan *misionismenya*, yang berada di baris depan gerakan-gerakan itu adalah mereka yang kehilangan kedudukannya dalam perubahan yang terjadi saat itu. Terutama para Bekel yang bagian tanahnya diperkecil. Beberapa hal yang menyebabkan diterimanya paham komunis adalah kemerosotan umum di bidang ekonomi, ketidakpuasan reorganisasi tanah, janji-janji pembebasan pajak dan kerja wajib. Gerakan sosial petani yang dimotori oleh organisasi masa Serikat Islam, membawa kesadaran bahwa sudah saatnya masyarakat untuk melepaskan diri dari segala ikatan feodal dan kolonial yang dianggap menciptakan ketimpangan sosial masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Masalah penguasaan tanah yang berpusat pada seorang raja, menurut tradisi Jawa khususnya nampaknya menjadi suatu penghalang bagi pelaksanaan politik kolonial di tanah jajahan (*Vorsten Landen*) Surakarta, Boyolali pada khususnya. Proses modernisasi dan komersialisasi pedesaan yang ditata secara legal rasional harus berhadapan dengan pola pikir dan tradisi masyarakat yang tertata pada hubungan *patron-clien*. Akhir abad XIX rakyat Boyolali berada dalam kondisi ekonomi yang sangat buruk akibat eksploitasi kolonial dan kerajaan. Sunan sebagai penguasa kerajaan menghadapi krisis kewibawaan. Beliau berusaha mengangkat kembali kondisi kehidupan sosial ekonomi penduduk Surakarta dengan harapan kewibawaannya sebagai pengayom masyarakat dapat pulih kembali. Pemerintah Belanda sangat jeli memanfaatkan kondisi tersebut, dengan mengusulkan suatu perombakan agraria sebagai jalan menyelesaikan suatu persoalan yang sedang di hadapai sunan dengan disesuaikan kepentingan Belanda.

Melalui reorganisasi tanah pemerintah Belanda berhasil menjauhkan petani Boyolali dengan penguasa tradisional sebagai langkah awal proses mempermudah proses sewa-menyewa tanah. Namun rupanya reorganisasi tanah menjadi bumerang bagi pemerintah Belanda maupun Kesunanan. Petani yang sudah tunduk dan menerima pola tradisional yang menempatkannya sebagai *penggadu* tanah raja, yang harus mengerjakan tanah tersebut dengan seluruh bakti kepada penguasa di atasnya, dipaksa dengan radikal untuk mengubah pandangannya

terhadap penguasa tanah perkebunan. Sudah barang tentu petani menjadi asing dengan statusnya yang baru sebagai pemilik tanah. Keadaan tersebut ditambah dengan penyelewengan *Agrarische Wet* beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya telah meresahkan petani Boyolali. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat Boyolali yang mulai sebal terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah Belanda yang hendak mengubah masyarakat dan menyengsarakan masyarakat Boyolali, maka mereka mengadakan gerakan sosial.

5.2 Saran-Saran

- 1) Dalam menerapkan peraturan baru hendaknya tidak dengan cara paksaan terhadap suatu tatanan masyarakat yang sudah mapan dan kuat berakar karena peraturan tersebut akan membingungkan masyarakat sehingga bisa menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya protes sosial dan meledaknya dendam terhadap kekuasaan yang mencoba memaksakan sistem baru tersebut.
- 2) Untuk melaksanakan reorganisasi tanah hendaknya dijalankan secara hati-hati dengan mengkaji efek sampingan yang akan ditimbulkannya apalagi terhadap masyarakat desa yang memandang tanah sebagai bagian hidupnya, sebagai *wutah-rah* dan sebagai *pusaka*. Hal ini juga berlaku bagi pemerintahan sekarang dalam menentukan kebijakan, utamanya yang menyangkut kebijakan masalah agraria.

Daftar Pustaka

Sumber Sekunder

- Bremen, Jan, 1988. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, LP3ES, Jakarta
- Burger, 1962. *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia I*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Chambers, Robert 1991 *Participatory Rural Appraisal*, XTAN Irlandia
- Consuwelo, etc. 1995. *An Introduction to Reseach Methods*, Rex Printing co Philiphines
- Dieter Evers, Hans., 1982. *Sosiologi Perkotaan*, UI Press, Jakarta
- Djoko Saryo, 1985. *Gerakan Petani dalam Prisma, no 11*, LP3ES, Jakarta
- Wolf, Eric, 1969. *Pesant Wars of the Twentieth Century*, Harper & Ro, New York
- Frederick, William & Soeri Soeroto, 1984, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, LP3ES, Jakarta
- Fauzi, Noer, 1999. *Petani dan Penguasa Dinamika Politik Perjalanan Agraria Indonesia*, Pustaka Pelajar Jogjakarta
- Greg, Soetomo 1999, *Kekalahan Manusia Tani*, Kanisius, Yogyakarta
- Gonggong Anhar, 1992, *Abdul Qahar Mudzakar. Dari Patriot Hingga Pembrontak*, The Press, New York
- Hofer, Eric, 1992. *Gerakan masa*, Yayasan Obor Jakarta
- Koentjoroningrat, 1978. *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta
- Kartodirdjo, Sartono, 1984. *Pembrontakan Petani Banten 1888*, Pustaka Jaya Jakarta
- Kartodirdjo, Sartono, 1991. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Kartodirdjo, Sartono, 1970. *Lembaran Sejarah 6*, Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, Jogjakarta
- Kuntowijoyo, 1993. *Radikalisasi Petani*, Bentang Intervisi Utama, Jogjakarta

- Larson, George, 1990. *Masa Menjelang Revolusi Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, UGM Press, Jogjakarta
- Landsberger, Henry & Alexandro YU, 1984. *Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial*, Rajawali Jakarta
- Mubiarto dkk, 1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Jogjakarta
- Murtono, Sumarsaid, 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara Jawa Masa Lampau*, LP3ES, Jakarta
- Moryadi, 1997. *Aksi Unjuk Rasa Para Supir di Surabaya*, Lemlit Unair, Surabaya
- Onghokham, 1991. *Rakyat dan Negara*, LP3ES, Jakarta
- Panitia Penyusun, 1992. *Sejarah Hari Jadi Kabupaten Boyolali Wiku Suci Mangesthi Projo*, Kabupaten Boyolali
- Purwanto, Bambang, 1985. *Kepemimpinan dan Masalah Pertanahan di Pedesaan Jawa*, Depdikbud Dirdjen Proyek Penelitian Pengkajian Kebudayaan Nusantara, Jogjakarta
- Sasongko, Triyogo, 1991. *Manusia Jawa dan Gunung Merapi, Persepsi dan Sistem Kepercayaan*, UGM Press, Jogjakarta
- Scott, James, 1983. *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Perubahan Sosial di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta
- Soedjatmoko dkk, 1995. *Historiografi Indonesia*, Gramedia, Jakarta
- Soekamto, Suriyono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta
- Suhartono, 1991. *Apanage dan Bekel, Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1930*, Tiara Wacana, Jogjakarta

Sumber Primer

- Anonim, 1924. *Sri Poestoko Soenan Nummer*, Balai Pustaka, Weltevreden
Arsip Keraton Surakarta, kode P.1960
- Bewada Nata, 1931 no 44
- Rijksblad Soerakarta, 1917. no 35
- Rijksblad Soerakarta, 1918. no 23
- Rijksblad Soerakarta, 1938. no 10

Hasil Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Sulaiman Harjo wiryono
 Umur : 81 tahun
 Pekerjaan : Pensiunan Polisi
 Alamat : Banyudono, Boyolali

Menyatakan bahwa pada tanggal 22 Nopember 1999, telah diwawancarai oleh Edy Budi Santoso Staf Pengajar Unair.

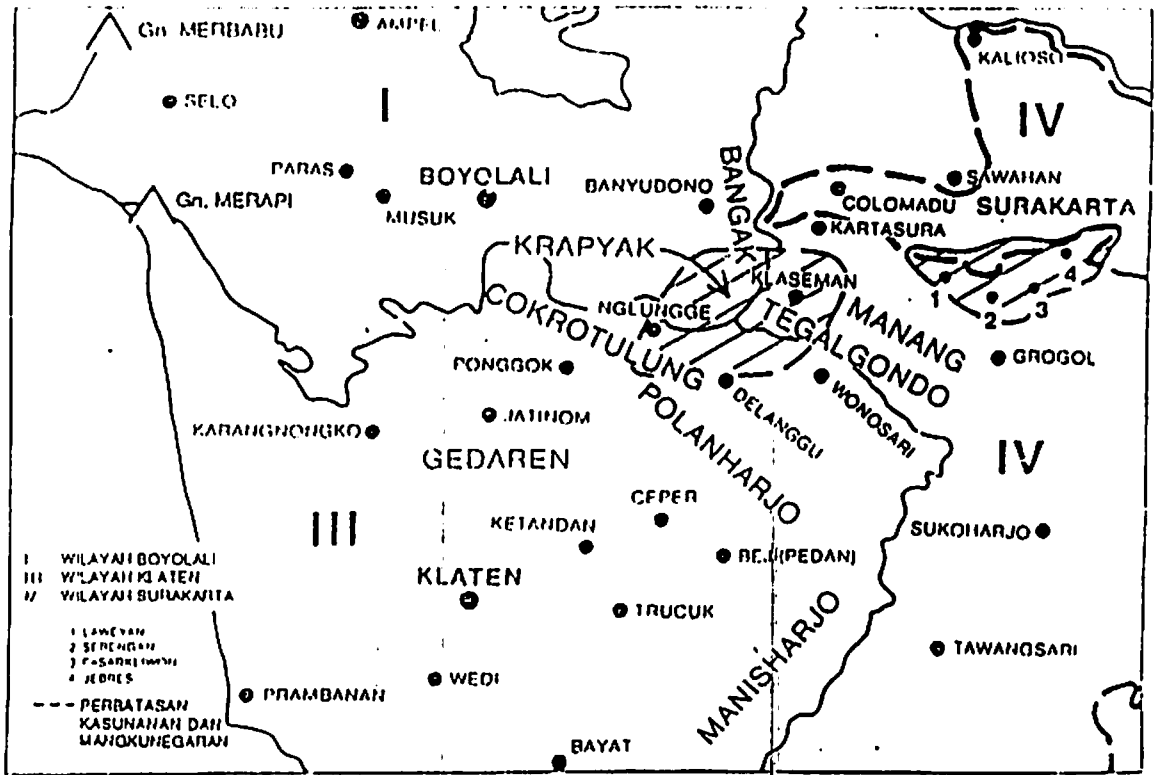
Ringkasan Wawancara.

Wilayah Cepogo, Sukorame, awal tahun 1918 merupakan perkebunan tebu, tetapi menjadi hancur karena dirusak rakyat, rakyat tidak rela tanahnya disewa lagi, tanaman tebu diganti menjadi tanaman serat nanas. Wilayah Bangak dan Banyudono menjadi wilayah perkebunan tebu yang hasilnya dikirim ke P.G. Delanggu. Semula merupakan perkebunan milik Inggris, akibat kekurangan modal maka akhirnya jatuh ke tangan Belanda. Selama perkebunan di kuasai oleh penguasa asing ini pun sering terjadi kerusuhan.

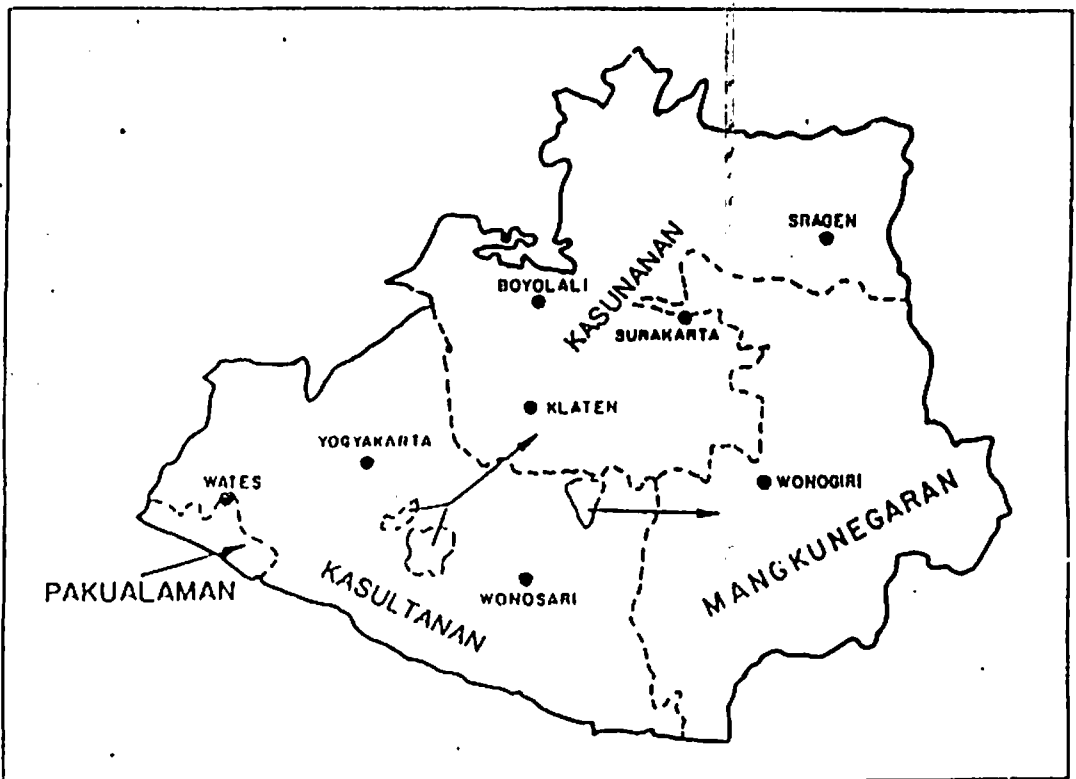
Proses sewa-menyewa tanah secara paksa dilakukan oleh Belanda di Boyolali atas perintah Gubernemen. Apabila pemerintah menginginkan tanah untuk areal perkebunan cara yang di tempuh mula-mula, Residen memerintah Bupati Pangreh Projo Boyolali agar memrintah lurah bawahannya supaya membebaskan tanah melalui sewa tanah dengan di sertai ancaman. Apabila Bupati dan Lurah tidak mengindahkan maka mereka akan di pecat dari kedudukannya. Demikian pula cara yang di pakai untuk mendapatkan tenaga kerja perkebunan. Sehingga tinggal beberapa orang yang tersisa memiliki tanah yang agak luas dan mereka di sebut "ndoro mantri", seperti bapak H. Mardi yang dikatakan sebagai elit desa setempat. Para petani dipekerjakan di perkebunan Cepogo, Bangak, Banyudono, selain itu masih di bebani kerja ekstra *heerendiensten*, mereka menyebut *ireng dines*, suatu kerja bakti untuk perbaikan jalan, komplek sinderan, jalan rel dll.

Responden


 (Sulaiman Harjo Wiryono)

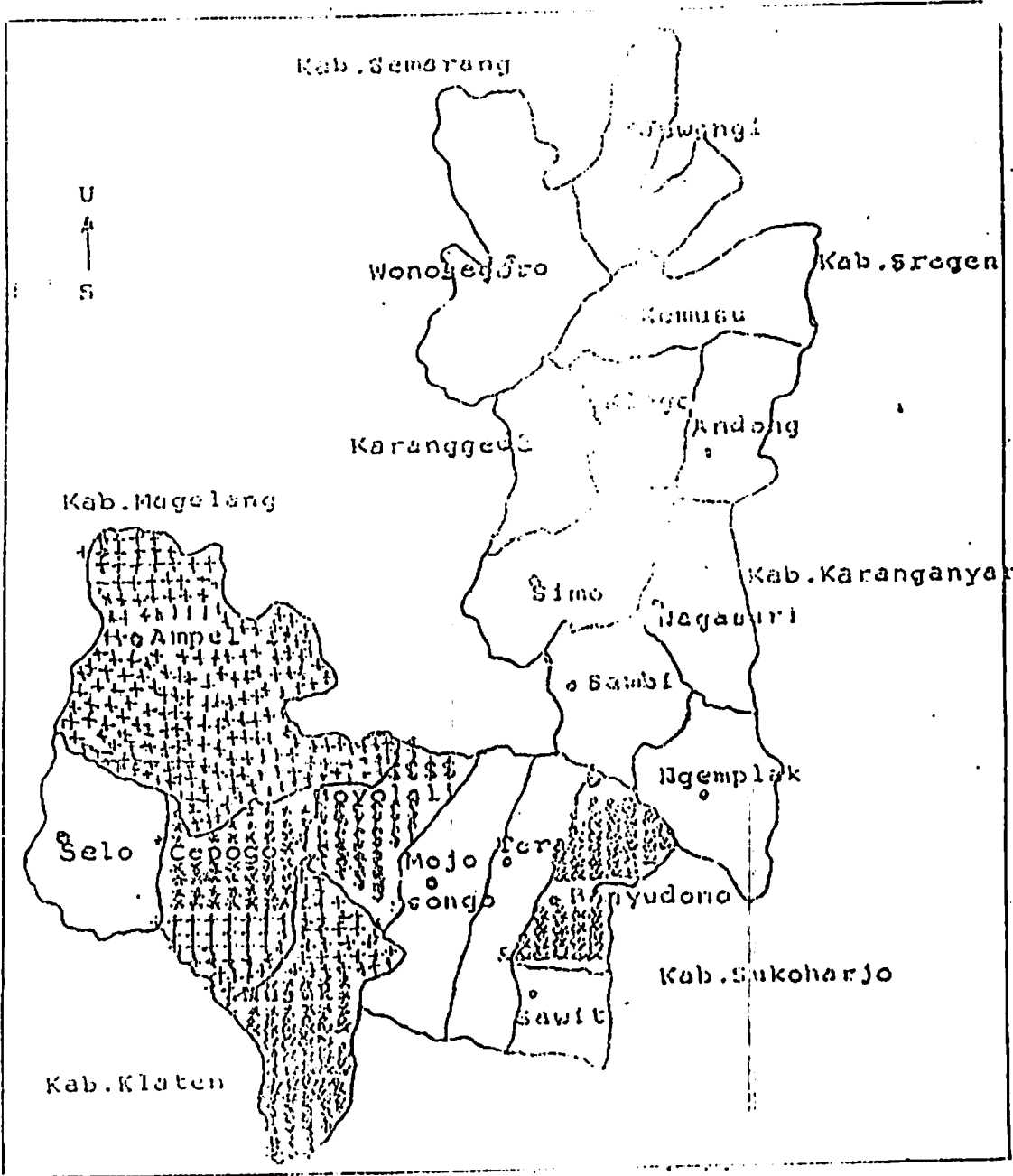


Peta 1. Daerah pertanian Inti Surakarta, 1922.



Peta 2. Vorstelanden, 1921. (Disadur dari Nieuwe Indische Gids, 1921, 15, 384.)

Peta Penyebaran Perkebunan di Boyolali
(Skala 1 : 240.000)



Sumber : Indische Verslag (statistik tahunan Soerakarta
1937 - 1944 / arsip Kraton Surakarta kode. P 1678.

Keterangan

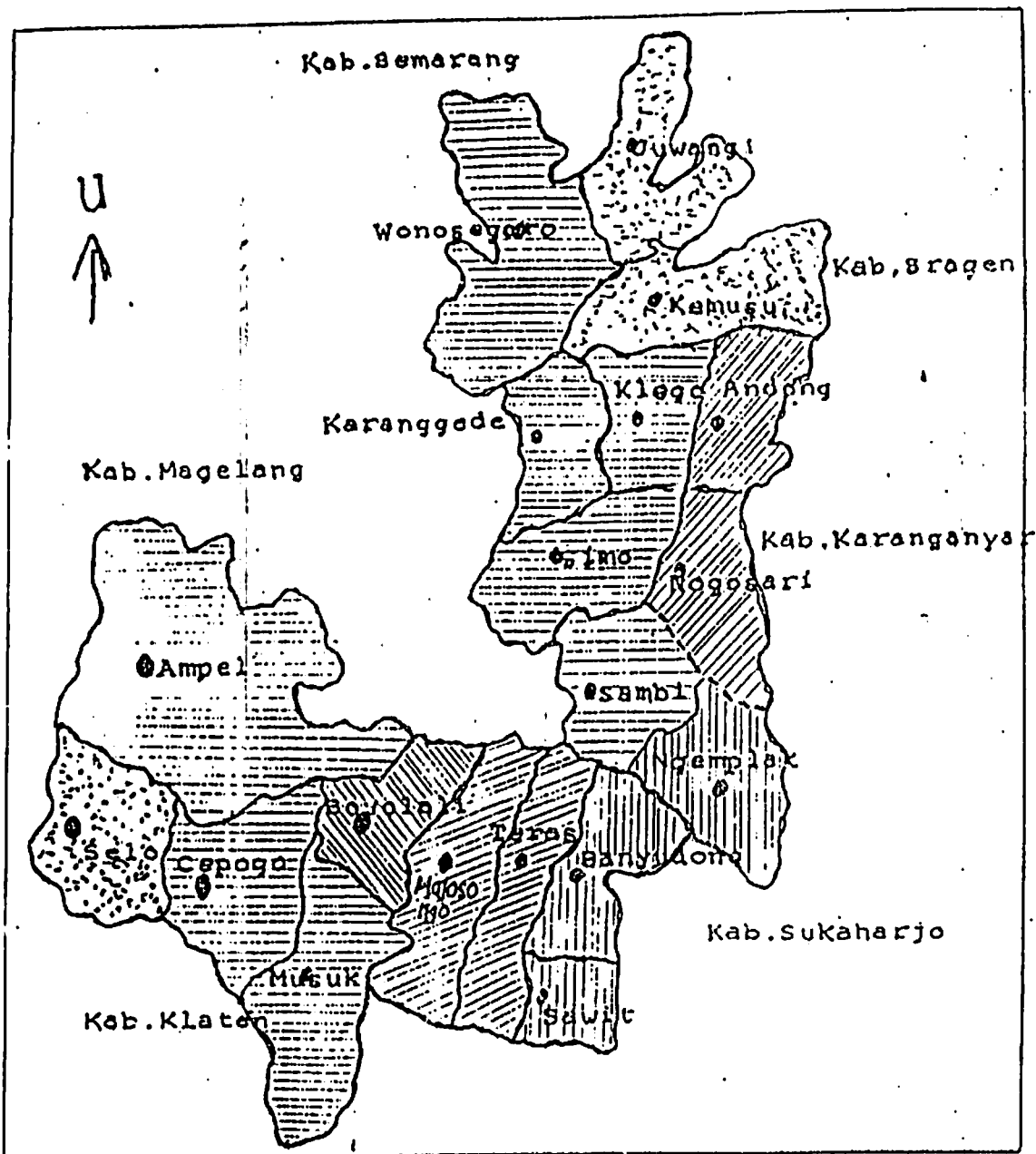
\$ = serat nenas

x = kopi

& = tebu

+ = teh

Peta : Wilayah Kabupaten Boyolali
(skala 1 : 240.000)



Sumber : Indische Verslag (statistik tahunan Surakarta 1937-1944), arsip Klaten Surakarta kode P. 1. 670.
LAPORAN PENELITIAN Pengaruh Reorganisasi Jarak Pedy, Bud. 1970...

LUAS TANAH, PAJAK TANAH DAN HARGA PADI DI SURAKARTA TAHUN 1920-1929

Tahun	Distrik	Luas sawah/bau		Harga padi/pk	Luas te- galan/bau	Pajak ta- galan/ nah/f	Pajak sa- wah dari hasil/%	Keterangan
		kena pajak	bebas pajak					
1920	Prambanan	5629	1389 t 70	3,-	4471	46222,-	13	t=tegalan dijadikan lungguh.
	Bayat	5332	1568 t 275	3,25	4210	35816,-	13	
	Klaten	3915	863 t 36	3,50	2065	33455,-	14	
1921	Karangnongko	3398	584 t 881	3,40	7931	28063,-	13	
	Ponggok	7139	1180 t 95	3,40	2230	43580,-	13	
	Triagan ^x	1105	164	3,25	309	2340,-	13	x = onder- neming
1922	Delanggu	11297	2810 t 23	3,50	4878	99617,-	13	
	Buji	7494	1944	3,40	3644	47943,-	13 & 12	
1923	Banyudono	4139	912 t 57	3,40	1784	50658,-	14	
	Kartosuro	3669	860 t 27	3,50	2250	29587,-	15	
	Grogol	5348	1276	3,25	2526	35297,-	14 & 13	
1924	Gesi	5481	987 t 96	3,25	17832	16929,-	11	
	Gemolong	16834	2613 t 452 t 186	3,25	20618	49045,-	12	
	Sukoharjo	13411	1430	3,25	9455	70286,-	13	
	Boyolali	599	151 t 1109	3,40	9363	28198,-	14	
1925	Sragen	10486	774	3,50	3954	57841,-	13	
	Gondang	7821	659	3,50	6026	45631,-	13	
	Masaran	10002	911	3,50	3845	39716,-	13	
	Ampeol	585	147 t 1037	3,40	9119	16693,-	13	
1926	Sawahan	4050	696	3,25	3960	28135,-	13	
	Simo	6666	924	3,25	7355	33605,-	12	
	Tawang Sari	6472	1203 t 30	3,25	7927	41256,-	12	
1927	—	—	—	—	—	—	—	
1928	Juwangi	3236	846 t 99	3,50	11277	38780,-	12	
	Karanggede	6652	1272 t 3	3,50	11524	29791,-	12	

Sumber: Bundel Reorganisasi Tzq. Aq. 38725/1928.

- 15 -

Memba'el 'Oeloem, hingga kini akan mendjalar setiap District dan Onder District.

18. - Adanja Museum, dan Taman Pembat... Sodya Poestaka. 8

19. - Adanja Stadion Sriwedari, jang didalamnya tempat menghiboer hati jang goendah. Disediakan bermatjam-matjam binatang, Bioscoop dan Wayang orang. 8

20. - Adanja tempat peladjaran gending, njanji dan tari. .

21. - Adanja penerangan lampoe Electrisc, beliaulah jang membantoe dan beli nandeel banjak. S

- Dan masih banjak lagi kemadjoean² poela oempoma adanja Stadion dan taman serta pasar jang besar.

Sekaljan peringatn kita oentoek mengingat ujasa Almarhoem Padoeke jang Moelja lagi Birljaksana Sri Baginda Soesoehoenan Pakoe Boewono Sena Pati Ingologo Abdoer Rohman Sajidin panoto Gomo jang ke X.

Moedah-moedahan pengganti beliau, akan dapat memadjoekan langkah kearah kesedjahteran dan mendjoendjoeng tinggi akan perintah Allah dan memadjoekan Sjirat Islam. Amin.

Soerakarta, 20 Februari 1939.

Kemoedian maallah dan selamat bekerdja.

WASSALAM.

SOERAT PERDJANDJIAN ANTARA GOEPERMAN DAN SRI BAGINDA SOEOEHOENAN JANG KE X, DI SOERAKARTA.

Padoeke Sri Baginda Soesoehoenan P. B. X, heberapa hal: sebeloem dinobatkan diatas tachtta keradjaan, mengganti ojah-ohend Baginda, Almarhoem Sri Soesoehoenan P. B. IX, maka beliau telah menanda tangani diatas soerat perdjandjian dengan Goeperman, jang ma'nanja keerang l-bili begini:

- Kami jang bertanda tangan dibawah ini, Pangeran Adipati Anom Hamengkoenogoro Soedibya Radjo Poetro Narendro Mataram, menjotakan bahwa kami menjoenjel koewadjoeran terhadapan kepada Goeperman kalau kami atas kemoeratan Goeperman mengganti ojah kami almarhoem Sri Soesoehoenan Pakoe Boewono Senapati Ingologo Abdoer Rohman Sajidin Panoto Gomo ke IX, kami mengakoer akan peratoeran-peratoeran jang akan diadakan oleh Goeperman oentuk negeri Soerakarta tentang hal:

- 1.- Perbaiki Politie dan Justitie poela tentang pengadilan, baikpoen dalam perkara kepolisian dan crimineel, moepoen perkara civil.
- 2.- Seberapa besarnya pengurangan yang diadakan dalam pengganti kerogian yang akan diberikan kepada kami, kalau disebabkan dari pada perbaikan politic, begitoe djoega keadilan, memakan beaja, beaja itoelah sekarang kami memikoelnja, selandioetnja akan mendjadi tanggungan Goepermen.
- 3.- Tanah-tanah yang termasuk negeri Soerakarta, yang ada dalam Residentie Semarang dan dalam tanah Mangkoenegaron. Begitoe djoega tanah Mangkoenegaron, yang termasuk dalam kami poenja tanah.
- 4.- Pengasingan yang disebabkan dari pada perkara politiek dari kami poenja kawoela, yang dipandang mengchawartirkan ketentraman dan ketertiban oemoem.
- 5.- Oeroesan padjeg, kami tidak akan mengadakan padjeg baharoe, sebeloem mendapat persetoedjoean dari Goepermen.
- 6.- Penjwaan tanah kepada orang Europa dan kepada yang disamakan dengan dia. Kami akan membantoe perbaikan dan berlakoenja.
- 7.- Kemadjoean dari kewadajiban yang mendjadi pikoelan rajat dari tanah-tanah yang disewakan orang Europa dan kepada yang disamakan dengan dia, kewadajiban mana laloe mendjadi kewadjabannja sipenjewa tanah, kalau ada perselisihan yang terbit dari hal itoe, kami akan meneroet poatoesan Goepermen.
- 8.- Pemberian dengan tjoema² tanah yang akan digoenakan oentoek mendirikan roemah-roemah kepoenjaan Goepermen.
- 9.- Pemberian tanah Eigendom, atau Recht van opstal yang akan digoenakan erf, berdasar atas keadilan akan kami lakoekan dengan persetoedjoean Toean Resident.
- 10.- Didjalankannja peratoeran-peratoeran dari Residentie-Residentie ditanah Djawa tentang hal Eigendom dari barang-barang yang tetap (vaste goederen). Lebih tegas tanah-tanah Eigendom yang ditjatat dalam boekoe meneroet peratoeran, yang termaktoc dalam ordonantie, tetap tidak berubah, tidak perdoeli tanah Eigendom itoe djatoeh kepada siapa, terketjoeali kalau nda tanah-tanah yang didjoesal atau dengan tjara bagaimana djoega, djatoeh kami beli kepada kami, kedjedian mana haroes dihapuskan dari yotatan Eigendom, dan kembali mendjadi tanah biasa.

11.- Tambah salam dan membikin baharoe djalan-djalan, djambatan² dan pekerdjaan oemoem lain-lainnja.

12.- Oepaljara dari pesta- pesta dan lain-lain keramaian.

- Selandjoetnja boeat menjatakan bahwa kami dengan setya akan memenoehi barang apa terseboet diatas, kami menandai tangan dan memboeboeh tjap bersama-sama dengan pepatih dalem dari Negeri Soerakarta, dimoeka nenek Tocan Oscar Arend Bunnaby Lautier, Resident Soerakarta, atas toeroenan dari soepati berdjandjian ini.

- Demikianlah oentoeck menjatakan barang apa jang terkandung dalam senaubari kami, pada ini hari djoeaga kami menandai tangan bersoempah dan mengoeatkan dia dengan kami pcepat tjap, bersam-sama dengan kami poenja pembesar-pembesar dari kami poenja Keraton.

Perlama: Kami, Pakoe Boewono Senopati Ingalogo, Abdoerrohman, Sajidin Panotogomo X Soesoehoenan ydi Soerakarta berdjandji dengan soenggoeli-soenggoeli.

1- Goebermen kami poenja Pembesar jang tertinggi dan keowasaan jang dioentoeckkan bagi kami. Kami pandang sebagai kami poenja peperintahan, dan kami menoeendjoekkan semoea penghormatan, gehoorzaamheid dan pertolongan.

2- Perdijandjian - perdijandjian antara Soesoehoenan - Soesoehoenan jang kami ganti dengan Goepermen, perdijandjian mana meloeloe jang dibikin pada tanggal 22 Juni, dengan setya akan kami penoehi, dari hal itoelah jang teroetama.

3- Memadjoekkan kesahatan r'iat.

4- Memerintah berdasar atas keadilan.

5- Mendjoendjoeng tinggi perdamaian terhadap tentang kami.

6- Memberantas perdagangan monoesia.

7- Melindoengi pertanian.

8- Melindoengi keradjinan.

9- Melindoengi dagang.

10- Tidak berhoehoengan dengan soal ke-politiekkan dengan negeri-negeri loearan.

11- Tidak mengidzinkan bangsa asing, baik asal dari tanah koelolon, maoepoen asal dari tanah wetanan, boeat ber-tempat tinggal, kalau tidak dengan persetoedjoean dari Hoofd van Plaatslijkbestuur.

Keoeda: Menerangkan dan mengakoei, bahwa keloehoeran jang diberikan kepada kami, sebagai leenman dari tanah Soerakarta, sebagoimana jang diperintah oleh bekas Soesoehoenan, boekannja kami dapat jang disebabkan dari liak jang oda pada kami, akan tetapi ternyata disebabkan dari pada aanmerking dari lama dan kebaikan kami poenja dienst, dan sebagai satoe persoonlijk gunst bewijs dari ge-

Kelima: Menerangkan dan mengakoei bahwa kami menerima pindjeman tanah tersebut diatas dan bahwa Goepermen tetap mempoenjai hak dan atas tanah itoe oentoek mengambil kembali tanah jang kami pindjam. demikianlah kalau kami tidak memenoehi kewadajiban-kewadajiban kami, sebagaimana termaktoeb dalam perdjandjian-perdjandjian jang soedah diboeat dan jang akan diboeat.

Keempat: Kami berdjandji, setelah hal jang demikian itoe diminta kepada kami, perdjandjian-perdjandjian dengan Goepermen, jang soedah ada, akan diperbaiki atau diperbaroekan dan dikoeatkan, kami senantiasa bersetya, begitoe djoega semoea peratoeran jang ditoejdjoekan kepada katentreman dan kesedjaliteraan oemoem.

Kelima: Kami berdjandji dengan soenggoeh-soenggoeh, akan meloekokan menoeroet seberapa besar kekoecatan jang ada pada kami oentoek menjatakan kami ampoenja kesetyaan, kehambaan, dan terima kasih terhadap kepada Goepermen.

Keenam: Kami berdjandji bahwa kami akan dengan segera memberi tahoean semoea hal-hal jang penting oentoek Goepermen, dan bisa kami ketahoei kepada Toean Resident dan semoea hal-hal jang akan kami lakoekan kami terangkan, dan semoea pertimbangan dari Toean Resident itoe akan kami toeroet dengan setya dan adil.

PERINGATAN 200 TAHUN.

BERDIRINJA KERADJAAN SOERAKARTA HADININGRAT.
TAHOEN ISAKA 1670-1870.

Dihimpoe dari beberapa soerat dan kitab tambo.

Keroesakan keradjaan Kartasoera.

Dikalo tahoen 1740 Masehi, banjak sekali bangsa Tionghoa di Batavia jang direndalikan dan dihina-hinkean oleh Compañia. Mereka berkelahiran mengadakan peroesoahan merampok dan merampas. Sebahagian lagi ada poela jang lari ketanah Djawa Tengah.

Kebenaran dikalo itoe Mas Garendi tjoetjoe dari Soenan Mas. Berdiri sebagai pemberontak, dan dibantee oleh bangsa Tionghoa jang banjak sekali. Pemberontakan itoe masoeklah kedalem keradjaan Kartasoera, jang pada ketika itoe jang mendiadi Radja SH Baginda Soesoehoenon P. B. ke II. Tetapi tentara Kartasoera

Pembagian Kabupaten Pangreh Projo Boyolali 26
Tahun 1918

MNg.Surohartono; Wonosogoro: MNg.Hartowiloyo. (Alamak Narpowandowo ; 1931: 134-135).

Batas Kabupaten Pangreh Praja Boyolali secara lengkap pada tahun 1931 adalah sebagai berikut : (Ibid. :31-32)

Sejak dari puncak gunung Merapi ke barat sampai desa Tlogololo, terus ke timur laut sampai di puncak gunung Merbabu, sampai di desa Mongkrong, ke timur laut sampai di selatan gunung Buthak, ke selatan ke desa Kaliwatu, sebelah selatan Gendor dan Pager, terus ke timur sampai sebelah selatan sungai Pepe (Sungai Buthak) selatan desa Kener, ke arah timur laut sampai di desa Kadirojo. Ke barat laut sampai di Walen, sampai sebelah utara gunung Buthak mengikuti sungai Kentheng sampai pada pertemuan dengan sungai Sadhing. Ke utara sampai di desa Gumuk (Karanggede), terus ke barat daya sampai di desa Repaking. Dari sini ke utara sampai di desa Grobogan, ke utara di desa Sambeng, ke arah timur laut sampai desa Cerme, ke selatan ke desa Nglanji, ke timur ke desa Blawong, Sampangan, Jerukan, Juwangi, Kayen. ke timur ke desa Ngleses (distrik Juwangi). Dari Ngleses ke selatan sampai di desa Sabrang Lor, terus ke timur laut kemudian ke barat sampai desa Nglanji, ke selatan ke desa Pelomrejo, Pronggong, terus ke selatan ke desa Kedungdawa, ke barat daya ke desa Senggrong, terus ke selatan (distrik Karanggede) ke Pakel, Pulutan, ke tenggara ke desa Rembun, Ketitang, Klayutan dan ke selatan mengikuti jalan kereta api Sala - Semarang sampai desa Sawahan (distrik Temon).

Dari Sawahan ke barat ke desa Danaudan, Gagakapat, Kebon Agung (Temon), Deggungan, ke selatan ke desa Poni, Sambon di sebelah timur Guwokajen, sampai sungai Tegalganda (batas daerah Klaten - Banyudono). Selanjutnya sebelah selatan dimulai dari desa Ngemplak ke barat ke desa Manjung, Tegulrejo, sebelah utara Doplang, Bontitan (Distrik Banyudono) sampai di desa Jambu, Tambak, ke barat sampai desa Singosari, Keposong, terus ke arah barat daya sampai ke desa Jonawa, Seruni sampai ke perbatasan daerah Yogya - karta, terus ke barat laut sampai di desa Tlogolele, puncak gunung Merapi.

Pembagian wilayah Kabupaten Pangreh Praja Boyolali pada tahun 1918 menjadi enam Kawedanan Distrik, ialah Distrik Kota Boyolali, Banyudono, Temon, Karanggede dan Ampel serta Juwangi. Daerah-daerah tersebut beserta kelanya (Panowu), adalah sebagai berikut :

- a. Kapanewon Distrik Kota Boyolali. Panowu Kolektor: MNg.Mangunsudarso. Terdiri dari 4 Kaonderan Distrik (Kamantren), yaitu :
 - 1) Onder Distrik Kota Boyolali, terdiri 17 Kelurahan. Mantri Onder

- 2) Onder Distrik Musuk, terdiri 11 Kelurahan. Onder Distriknya :
MNg. Siswopranoto.
 - 3) Onder Distrik Majasanga, terdiri 13 Kelurahan. Onder Distriknya:
MNg. Mardicastro.
- b. Kapanewon Distrik Banyudono, terdiri 4 Onder Distrik, Panowu Distriknya : MNg. Reksoprancto.
- 1) Onder Distrik Banyudono, terdiri 17 Kelurahan. Onder Distriknya :
MNg. Sumoloksono.
 - 2) Onder Distrik Teras, terdiri 17 Kelurahan. Onder Distriknya :MNg.
Mangkuwijoyo.
 - 3) Onder Distrik Sawit, terdiri 17 Kelurahan. Onder Distriknya :
MNg. Surosuripto.
 - 4) Onder Distrik Sambi, terdiri 12 Kelurahan. Onder Distriknya :
MNg. Kartisastro.
- c. Kapanewon Distrik Temon, terdiri 4 Onder Distrik. Panewu Distriknya : RNg. Mangunsucitro.
- 1) Onder Distrik Temon, terdiri 10 Kelurahan. Onder Distriknya :
RNg. Danusastro.
 - 2) Onder Distrik Simo, terdiri 10 Kelurahan. Onder Distriknya :
MNg. Joyowajono.
 - 3) Onder Distrik Ngemplak, terdiri 15 Kelurahan. Onder Distriknya:
RNg. Citrokusumo.
 - 4) Onder Distrik Nogosari, terdiri 10 Kelurahan. Onder Distriknya:
MNg. Citrowidodo.
- d. Kapanewon Distrik Karanggode, terdiri 3 Onder Distrik. Panewu Distriknya : RNg. Citrosadmoko.
- 1) Onder Distrik Karanggode, terdiri 18 Kelurahan. Onder Distriknya : dirangkap Panewu Distrik.
 - 2) Onder Distrik Ngandong, terdiri 17 Kelurahan. Onder Distriknya:
MNg. Citrofarmoyo.
 - 3) Onder Distrik Klego, terdiri 12 Kelurahan. Onder Distriknya :
MNg. Cokrosudirjo.
- e. Kapanewon Distrik Ampel, terdiri 3 Onder Distrik. Panewu Distriknya : RNg. Sutowardoyo.
- 1) Onder Distrik Ampel, terdiri 17 Kelurahan. Onder Distriknya :
dirangkap Panewu Distrik.

- 2) Onder Distrik Cepaga, terdiri 12 Kelurahan. Onder Distriknya : RMNg. Puspopranoto.
 - 3) Onder Distrik Sela, terdiri 10 Kelurahan. Onder Distriknya : RMNg. Surotranggono.
- f. Kapanewon Distrik Juwangi, terdiri 3 Onder Distrik. Panewu Distriknya : MNg. Mangunsarsono.
- 1) Onder Distrik Juwangi, terdiri 11 Kelurahan. Onder Distriknya : dirangkap Panewu Distrik.
 - 2) Onder Distrik Kemusu, terdiri 12 Kelurahan. Onder Distriknya : MNg. Citrosasono.
 - 3) Onder Distrik Wonosegoro, terdiri 18 Kelurahan. Onder Distriknya : RNg. Margosastro.

Selanjutnya yang menjabat :

Dupati : RT. Suronagoro; Dupati Anom : RT. Brotowadono.

Mantri Sekretaris : MNg. Singowidagdo; Mantri Kabupaten : MNg. Surosubroto.

Pangulu : MNg. Muhammad Saleh.

Pengadilan Landraad : Jaksa : M. Amir Sumodiharjo.

Ajunct Jaksa : M. Mangunsudarmo; Pangulu : M. Haji Suleman.

Perubahan daerah tersebut sebagai akibat adanya peraturan baru tentang Pangreh Praja (bestuur hervorming) pada tahun 1918, Staatsblad 1918 no. 560. di mana Pemerintah Surakarta dibagi menjadi dua Afdeling yang diperintah oleh seorang Residen, yaitu Afdeling Kota Surakarta yang terdiri dari: Kabupaten Pangreh Praja Kota Surakarta, Sragen, Kota Kadipaten Mangkunegaran dan Wonogiri; serta Afdeling Klaten, yang terdiri dari Kabupaten Pangreh Praja Klaten dan Boyolali.

Selanjutnya pembagian wilayah tersebut mengalami perubahan lagi pada tahun 1938, termuat dalam Rijksblad Surakarta 1938, no. 10 dan diubah lagi pada 28 September 1939, no. 5V/5^I, dan untuk Kabupaten Boyolali no. 1305 A/96, sebagai berikut : (Kabar Pemerintahan, 15 September 1939, no. 18 : 28 - 48).

Daerah Kabupaten Boyolali terdiri 5 Kapanewon Distrik, yaitu :

a. Kapanewon Distrik Kota Boyolali, terdiri 4 Onder Distrik :

- 1) Onder Distrik Kota Boyolali, terdiri 9 Kelurahan, yaitu : Siswodipuran, Pulison, Dancran, Wiong, Penggung, Kiringan, Kebonbimo, Mudal dan Tegalsari.

- 2) Onder Distrik Musuk, terdiri 20 Kelurahan, yaitu :

Musuk, Trasaba, Ringin Larik, Cluntang, Sruni, Sanggup, Mrijan ,

Lanjaran, Sukorano, Pusporenggo, Kebongula, Manggung, Kepoh, Keposong, Karang Kendal, Karanganyar, Sragon, Lampar, Sumur, Jemawa.

3) Onder Distrik Teras, terdiri 12 Kelurahan, yaitu :

Krosak, Tawangsari, Gunungkrejo, Teras, Majalegi, Randuserji, Sudimara, Bangsalan, Doplang, Salakan, Nopen, Kopen dan Kadirejo.

4) Onder Distrik Majasanga, terdiri 13 Kelurahan, yaitu :

Kemiri, Majasanga, Dutuh, Tambak, Karangnangka, Singosari, Madu, Dlingoo, Metuk, Kragilan, Brajan, Jurug, dan Manggis.

.. Kepanewon Distrik Temon (Simo) terdiri 4 Onder Distrik, yaitu :

1) Onder Distrik Temon (Simo), terdiri 13 Kelurahan, yaitu :

Gunung, Bendungan, Wates, Blagung, Temon, Kedung Longkong, Wahlen, Polem, Sumber, Simo, Ponthur, Talakbrata, dan Teter.

2) Onder Distrik Klogo, terdiri 13 Kelurahan, yaitu :

Klogo, Blumbang, Gondang Logi, Karanggatak, Bade, Banyuwip, Karangmaja, Sumberagung, Sangge, Kalongan, Sendangrejo, Jaten, Tanjung.

3) Onder Distrik Nogosari, terdiri 13 Kelurahan, yaitu :

Glonggong, Pulutan, Rombun, Kotitang, Teron, Patranayan, Sembungan, Guli, Keyongan, Tegalgiri, Pojok, Ponda, dan Kenteng.

4) Onder Distrik Andong, terdiri 16 Kelurahan, yaitu :

Andang, Beji, Kacangan, Maja, Senggrong, Kedungdawa, Pranggong, Kunthi, Pohong, Munggur, Kadipaten, Semawung, Polemrejo, Gondangrawo, Pakel, dan Sempu.

.. Kepanewon Distrik Ampel, terdiri 3 Onder Distrik, yaitu :

1) Onder Distrik Ampel, terdiri 16 Kelurahan, yaitu :

Soladaka, Ngandon, Ngempon, Gondang, Wedolan, Candi, Urutsowu, Kali Genthong, Gladhagsari, Kumbang, Candisari, Ngagrang, Jlawrom, Ngadirejo, Sampotan, Nargoloka, dan Dukuh.

2) Onder Distrik Cepaga, terdiri 15 Kelurahan, yaitu :

Cepaga, Kembang Kuning, Gubug, Candi Gatak, Mliwis, Paras, Lunbung, Gedangan, Wanadaya, Sukabumi, Genting, Jelok, Jombang, Dakulan, Cabeyan Kunthi.

3) Onder Distrik Sela, terdiri 10 Kelurahan, yaitu :

Jeruk, Tarubatang, Senden, Sela, Nglonoah, Jarakah, Klakah, Suratelong, Samiran, dan Tlogohole.

3. Kapanewon Distrik Wonosegoro, terdiri 4 Onder Distrik, yaitu :

- 1) Onder Distrik Wonosegoro, terdiri 17 Kelurahan, yaitu : Gasana, Talilawang, Banyuasri, Wonosegoro, Garangan, Bandung, Ketoyan, Ngablak, Repking, Bojong, Deroak, Karangjati, Kedungpilang, Kalinanas, Bendan, Bengle, dan Gunungsari.
- 2) Onder Distrik Kemusu, terdiri 13 Kelurahan, yaitu : Kendel, Kawman, Guwa, Lemahireng, Wonoharjo, Nglanji, Ngrakua, Watugede, Paoingkerop, Klewor, Blawu, Kemusu Kulon, Genongsari.
- 3) Onder Distrik Juwangi, terdiri 10 Kelurahan, yaitu : Juwangi, Cerme, Sambong, Krobokan, Ngaren, Kalimati, Klego, Jerukan, Kayen, dan Ngleses.
- 4) Onder Distrik Karanggede, terdiri 17 Kelurahan, yaitu : Kebonan, Tegalsari, Pinggir, Lentengan, Manyaran, Klari, Dangkok, Bologan, Karangkepoh, Sendang, Sranon, Grogolan, Klumpit, Sempulur, Jatisari, Dala, dan Pengkol.

4. Kapanewon Distrik Banyudono, terdiri 4 Onder Distrik, yaitu :

- 1) Onder Distrik Banyudono, terdiri 16 Kelurahan, yaitu : Banyudono, Ketahun, Tanjungsari, Denggungan, Dangek, Bathan, Kuwiran, Peni, Cangkringan, Ngaru-aru, Jimbungan, Bendan, Dukuh, Jipangan, Sabon, dan Traju.
- 2) Onder Distrik Sawit, terdiri 12 Kelurahan, yaitu : Cepaka, Sawit, Jatirejo, Kateguhan, Karangduren, Gwadajen, Bendasari, Jenengan, Tlawong, Kemasan, Gembong, Manjung, dan Tegalrejo.
- 3) Onder Distrik Ngemplak, terdiri 12 Kelurahan, yaitu : Danahudan, Gagaksipat, Ngesrep, Ngargorojo, Subakarta, Sendon, Dibal, Munggun, Girirata, Kismayasa, Pandeyan, dan Sawahan.
- 4) Onder Distrik Sembu, terdiri 16 Kelurahan, yaitu : Sembu, Jatisari, Candan, Tempursari, Glintang, Jawangan, Babadan, Tawengan, Catur, Ngaglik, Demangan, Senthing, Trasaba, Nglambu, dan Cerna.

4. Tumbuhnya Onderneming di daerah Kabupaten Boyolali.

Di muka telah dijelaskan, bahwa Rijksblad Surakarta 1918, no. 23 dan no. 24 menjadi dasar penggantian nama Abdi Dalem Pulisi menjadi Abdi Dalem Pangreh Praja. Termasuk di dalamnya pada Kabupaten Pulisi

No. 35. Apanages. Ophheffing apanages, gelegen in de districten kota Solo, Sawahan, Grogol, Soekohardjo en Tawangarsari, (afdeeling Soerakarta) Banjoedono, Bojolali en Ampel (afdeeling Bojolali), Koetogede en Imogiri (Residentie Djokdjakarta.)

Pranatan van den Rijksbestuurder van Soerakarta ddo. 11 Juli 1917, No. 365.

Pranatan van den Rijksbestuurder van Soerakarta ddo. 11 Juli 1917 No. 365.

De Rijksbestuurder van Soerakarta, daartoe gemachtigd door Zijne Hoogheid den Soesochoenan van Soerakarta en handelende in overleg met den Resident van Soerakarta, stelt vast de volgende verordening:

De Rijksbestuurder van Soerakarta, daartoe gemachtigd door Zijne Hoogheid den Soesochoenan van Soerakarta en handelende in overleg met den Resident van Soerakarta, stelt vast de volgende verordening:

Verordening betreffende de ophheffing van apanages, gelegen in de districten Kota Solo, Sawahan, Grogol, Soekohardjo en Tawangarsari, (afdeeling Soerakarta), Banjoedono, Bojolali en Ampel, (afdeeling Bojolali), Koetogede en Imogiri (Residentie Djokdjakarta).

„Verordening betreffende de ophheffing van apanages, gelegen in de districten Kota Solo, Sawahan, Grogol, Soekohardjo en Tawangarsari, (afdeeling Soerakarta), Banjoedono, Bojolali en Ampel, (afdeeling Bojolali), Koetogede en Imogiri (Residentie Djokdjakarta).”

Op den 1sten Augustus 1917, of den 12en Sawal Dal 1817, worden alle aan Z. H. den Soesoehoennan lochhoornde-ganjden, gelegen in de districten Kola Solo, Sawahan, GROGOL, SOEKOHARDJO en TA-VANGSARI, behoorende tot de af-deeling Soerakarta, BANGJEDONO, BOJOLALI en AMPEL, behoorende tot de afdeling Bojohali, KOETOGEDe en INOGIRI, behoorende tot de residentie Djokdjakarta, welke in apunage zijn afgestaan aan s Vorsten bloed- en nanverwanten en dienaren, door het Rijk teruggenomen, in ver-band waarmede de ex-gerpanageer-den voortaan hunne bezoliging in geld uitbetaald krijgen en wel op den 1sten van elke Hollandsche maand ten bedrage van een twaalfde gedeelte van de berekende jaarlijk-sche opbrengst van hunne gewozen apunagegronden, aanvaagende ook op den 1sten Augustus 1917, wordende voor het gemak de uit te keeren bedragen afgerond tot halve guldens.

Op den 1sten Augustus 1917, of den 12en Sawal Dal 1817, worden alle aan Z. H. den Soesoehoennan lochhoornde-ganjden, gelegen in de districten Kola Solo, Sawahan, GROGOL, SOEKOHARDJO en TA-VANGSARI, behoorende tot de af-deeling Soerakarta, BANGJEDONO, BOJOLALI en AMPEL, behoorende tot de afdeling Bojohali, KOETOGEDe en INOGIRI, behoorende tot de residentie Djokdjakarta, welke in apunage zijn afgestaan aan s Vorsten bloed- en nanverwanten en dienaren, door het Rijk teruggenomen, in ver-band waarmede de ex-gerpanageer-den voortaan hunne bezoliging in geld uitbetaald krijgen en wel op den 1sten van elke Hollandsche maand ten bedrage van een twaalfde gedeelte van de berekende jaarlijk-sche opbrengst van hunne gewozen apunagegronden, aanvaagende ook op den 1sten Augustus 1917, wordende voor het gemak de uit te keeren bedragen afgerond tot halve guldens.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Ook van de in bovengenoemde
districten gelegen gronden, behoorende tot de Pangrebo of Kadipaten-annom, zullen met ingang van

De pachten en de zoo noodig in
gold omgecte andere opruigsten
der teruggecomen apunagegronden
moeten, te beginnen met de pascokan garebeg floelod Be 1818 aan het Rijk worden ogebracht, terwijl de ex-garapanageerden nog gerechtelijk zijn om de pacht over de pasokan garebeg Poesa Dal 1817 in ontvangst te nemen en bovendien door gevraagd kunnen beschikken over tusschenkomst van het Rijk over pasoomhang, vermeld in de betrokken plagens en huurcontracten.

Handwritten text in a cursive script, likely Dutch or Indonesian, covering the right side of the page. The text is dense and spans most of the page's height.



worden geslagen.
 Iden Soero Be 1848, zal geen recht
 na den 1sten November 1917 of den
 Op eventuelo reclamies, ingediend
 als apanage zijn opheffen.
 der nening Tjolomadoo en nog niet
 arcaal der Mangkoenegaransche on-
 die, welke gechnaaverd liggen in het
 Bakipandjan en Repaking, alsmede
 aan de ondernemingen Temoeloes,
 districten gelegen gronden, verhuurd
 begrepen te behooren de niet in deze
 deze opheffing van apanages tevens
 districten worden ten opzichte van
 Tot de gronden van bovenvermelde

soembangs.
 rcheg Poesa Dal 1847 en de pa-
 trent de pacht over de pasokan ga-
 van het hierboven gestipuleerde om-
 betaald, tevens met inachtneming
 don aan-de-Kriton kas worden uit-
 aangegeven voor de ex-gapanageer-
 opgebracht en op dezelfde wijze als
 opbrengsten aan het Rijk worden
 zoo noodig in geld omgezette andere
 Augustus 1917 de pachten en do

[The following text is a mirrored or bleed-through image of the Dutch text on the left, appearing upside down and mirrored across the page.]

Handwritten text in Indonesian script, likely a title or header for the document.

Handwritten text in Indonesian script, possibly a preface or introductory paragraph.

Handwritten text in Indonesian script, possibly a date or location reference.

Handwritten text in Indonesian script, possibly a signature or official name.

Handwritten text in Indonesian script, possibly a signature or official name.

Een ieder neme van het bovenstaande kennis en kome het voor zooveel noodig na.

Deze Oendang-Oendang zal worden toegezonden aan al de Hoofden, en op de gebruikelijke wijze worden angeplakt, opdat niemand daarvan onwetendheid voorwende

Gedaan den, 11en Juli 1917.

In overeenstemming met mij Resident van Soerakarta.

GELPKE.

Ter afkondiging:
De Wd. Rijksbestuurder,
DJOJONAGORO.

Handwritten text in Dutch script, likely a title or header.

Handwritten text in Dutch script, possibly a list or detailed notes.

Handwritten text in Dutch script, continuing the document's content.

Handwritten text in Dutch script, including what appears to be a date and reference number.

Handwritten text in Dutch script, possibly a signature or final note.

Handwritten text in Dutch script, located on the left side of the page.

Handwritten text in Dutch script, located on the left side of the page.

Handwritten text in Dutch script, located on the left side of the page.

Handwritten text in Dutch script, located on the left side of the page.

Handwritten text in Dutch script, located on the left side of the page.

R I J K S B L A D S O E R A K A R T A

၂၄၀၀ ပြည်နယ်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊
၂၄၀၀ ပြည်နယ်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊
၂၄၀၀ ပြည်နယ်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊

အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၂၄၀၀ ပြည်နယ်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊
၂၄၀၀ ပြည်နယ်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊
၂၄၀၀ ပြည်နယ်၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊

၆ : ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ : ၇ : ပြည်ထောင်စု
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၈ : ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ : ၉ : ပြည်ထောင်စု
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၉ : ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ : ၁၀ : ပြည်ထောင်စု
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၁၀ : ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ : ၁၁ : ပြည်ထောင်စု
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၁၁ : ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ : ၁၂ : ပြည်ထောင်စု
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၁၂ : ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ : ၁၃ : ပြည်ထောင်စု
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၁၃ : ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ : ၁၄ : ပြည်ထောင်စု
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
အမူကြံ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

de van den aangevraagden grond
onderstaand tarief worden gevolgd.

A. Hoofdplaats Soerakarta.

1. Gronden, gelegen aan de onder-
volgende wegen, van af f 4.— tot
en met f 5.— per M².

a. Wegen grenzende aan de „Pasar
Besar.”

b. Ketandan.

c. Slompretan Westwaarts tot aan
den kruisweg Singosaren.

2. Gronden, gelegen aan de onder-
volgende wegen, van af f 3.— tot
en met f 4.— per M².

a. Residentieaan.

b. Waroeng Felen.

c. Viersprong Nonongan Zuidwaarts
tot aan de brug over de kali La-
rangan.

3. Gronden gelegen aan de onder-
volgende wegen van af f 2.— tot
en met f 3.— per M².

Handwritten text in Indonesian script, likely a legal or administrative document. It contains several lines of text, some starting with 'dan' and 'atau', and appears to be a list or set of conditions.

- aan den viersprong Singosaren.
- g. van af den viersprong Gading Westwaarts tot aan den viersprong Gemblegan.
- h. van af den viersprong Gading Zuidwaarts tot aan den dijk.
- i. van af den viersprong Gemblegan Zuidwaarts tot aan den dijk.
- j. Poerwosariweg van af den viersprong bewesten kampoeng Timoeran tot aan den spoorbaan
- 6. Gronden elders gelegen: van af f 0.15 tot en met f 1.-- per M².

Handwritten section header in Indonesian script, possibly indicating a specific category or sub-section of the document.

B. Afdelingshoofdplaats Klaten.

Handwritten text in Indonesian script, continuing the list or conditions from the previous section. It includes terms like '1. Gronden' and '2. Gronden'.

- 1. Gronden, gelegen aan den weg Soerakarta, Jogjakarta van af f 0.50 tot en met f 1.-- per M².
- 2. Gronden, gelegen aan den Stationsweg, van af f 0.30 tot en met f 0.50 per M².

3. Gronden elders gelegen van af
 f 0,05 tot en met f 0,15 per M².

2. Gronden, gelegen aan de overige
 kolawegen van af f 0,15 tot en met
 f 0,40 per M².

1. Gronden, gelegen aan den weg
 Soerakarta, Salatiga, van af f 0,50
 tot en met f 0,60 per M².

C. Afdelingshoofdstuk
 Notarial.

3. Gronden, gelegen aan de overige
 kolawegen, van af f 0,10 tot en met
 f 0,30 per M².

4. Gronden, elders gelegen, van af
 f 0,05 tot en met f 0,10 per M².

Ken ieder name hiervan kennis en
komt haer voor zooveel noodig na.

Handwritten text in Dutch, likely a header or title.

...naren"
...an al genaamd "bestuursambte-
...uitoefening van bestuur, worden van
...ren, doch mede hooft zijn met de
...die tot de politiebureaux behoo-
...klivens, pantwees, mant's onz,
...s Vorsten dienen de regenten,

Handwritten text in Dutch, main body of the document.

...maakt het volgende bekend:
...met den Resident van Soerakarta,
...rakarta en handelende in overleg.
...Hoogheid den Soesoeoocman van Soe-
...ta, daartoe gemachtigd door Zijne
...De Rijksbestuurder van Soerakar-

Handwritten text in Dutch, main body of the document.

...1918, 12 October 1918 No. 383.
...Pranatan van den Rijksbestuurder

Handwritten text in Dutch, likely a signature or date.

RIJKSBLAD SOERAKARTA. No. 23. Bestuur. Bepaling dat politiebureaux belast met
het bestuur thans genaamd worden bestuursambtenaren.

Handwritten text in Indonesian script, likely a title or reference number, including the year 1918.

Gedaan den 12den October 1918.

Handwritten signature or name in Indonesian script.

In overeenstemming met mij:
Resident van Soerakarta,
HARLOFF.
Ter afskending:
De Rijksbestuurder van Soerakarta,
DJOJONAGOR O.

RIJKSBLAD SOERAKARTA.

No. 24. Districts- en onderdistrictshoofden. Vaststelling van de verplichtingen der districts- en onderdistrictshoofden.

Pranatan van den Rijksbestuurder, van Soerakarta ddo. 12 October 1918 No. 331.

De Rijksbestuurder van Soerakarta daartoe gemachtigd door Zijne Hoogheid den Soesoehoenan van Soerakarta en handelende in overleg met den Resident van Soerakarta, stelt vast de volgende oending-oending:

„Oending-oending noemens de verplichtingen der districts- en onderdistrictshoofden“.

De verplichtingen der districts- en onderdistrictshoofden bepalen zich niet uitsluitend tot politie aangelegenheden, doch zijn zij ook verplicht zich te bemoeien met de volgende bestuursaangelegenheden:

1. de zorg voor de openbare rust en

De districts- en onderdistrictshoofden bepalen zich niet uitsluitend tot politie aangelegenheden, doch zijn zij ook verplicht zich te bemoeien met de volgende bestuursaangelegenheden:

1. de zorg voor de openbare rust en

၂၂။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား
 ၂၃။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား
 ၂၄။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား
 ၂၅။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား
 ၂၆။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား
 ၂၇။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား
 ၂၈။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား
 ၂၉။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား
 ၃၀။ ဤအရာကိုအားဖြင့် အားပြု၍ စာတော်
 ပြား

- orde' in hun ressort.
2. de zorg voor de welvaart en gezondheid der bevolking en de bestrijding van alles wat ziekte kan veroorzaken.
 3. toegang zooveel mogelijk van ongeoorloofde handelingen en bescherming der bevolking tegen willekeur.
 4. hulpverleening bij voorkomende rampen en ongevallen en ter afwering van gevaar en ongelukken zoodanige maatregelen te nemen als waartoe zij bevoegd zijn.
 5. in gevallen waaruit gevaar kan ontstaan, zijn de district- en onderdistrictshoofden verplicht hiervan onmiddellijk aan den Regent kennis te geven, zoo ook indien zij in het algemeen belang voorstellen hebben te doen.
 6. het waken voor het welslagen en leverdering der opteergst van de aanplantingen zoecals padi, tweede gewassen en dergelijke, welke tot voeding der bevolking strekken; de zorg voor een goe-

၆။ ကျေးဇူးတင်စွာ အကျိုးပြုစေရန် အားထုတ်ရန်
ကျင့်ကြံရန် ဝန်ထမ်းများ

၇။ ကျေးဇူးတင်စွာ အကျိုးပြုစေရန် အားထုတ်ရန်
ကျင့်ကြံရန် ဝန်ထမ်းများ

၈။ ကျေးဇူးတင်စွာ အကျိုးပြုစေရန် အားထုတ်ရန်
ကျင့်ကြံရန် ဝန်ထမ်းများ

၉။ ကျေးဇူးတင်စွာ အကျိုးပြုစေရန် အားထုတ်ရန်
ကျင့်ကြံရန် ဝန်ထမ်းများ

၁၀။ ကျေးဇူးတင်စွာ အကျိုးပြုစေရန် အားထုတ်ရန်
ကျင့်ကြံရန် ဝန်ထမ်းများ

၁၁။ ကျေးဇူးတင်စွာ အကျိုးပြုစေရန် အားထုတ်ရန်
ကျင့်ကြံရန် ဝန်ထမ်းများ

၁၂။ ကျေးဇူးတင်စွာ အကျိုးပြုစေရန် အားထုတ်ရန်
ကျင့်ကြံရန် ဝန်ထမ်းများ

- de keuze en een behoorlijk onderhoud der zaden en het tijdig uitplanten der gewassen.
- 7. de zorg voor het goede onderhoud van dammen, loeidingen en dergelijken.
- 8. de zorg voor het vee en bevoordering van den veestapel.
- 9. bevordering van den handel en de nijverheid der bevolking.
- 10. het onderhoud van wegen en bruggen.
- 11. in alle opzichten medewerking te verleenen in zake de reorganisatie der agrarische en economische toestanden en in het bijzonder bij de invoering van die reorganisatie in hun ressort.
- 12. toe te zien dat de door het Bestuur vastgestelde regeling van de indeeling en bewerking der desagronden behoorlijk wordt nagekomen door het desabestuur.

1939
erk
do
do
den
ach
zijn
do
god
mi
opge
ig te
stuur
angs
chris
ge af
toe
ning
aggel
18.
:
F.F.

13. loezicht te houden op de werke-
zaamheden en het godring der de-
schoofden in hun ressort; de
districts- en onderdistrictshoofden
moeten in lijer, plichtsbetrach-
ting en godring een voorbeeld ziju
voor de deschoofden.

14. met onverdiolen lijer de opge-
zetenen in hun ressort uitlieg te
goven van de door het Bestuur
uitgevaardigde oending-oonclangs,
pranatus en andere voorschrift-
ten.

15. de zorg voor een regelmalige af-
beclilling der belastingen en loo-
ziclit uit te oefenen op de innalng
en overtoeling der belastinggel-
den.
Godaan den 12den October 1918.
In overeenstemming met mij:
Resident van Soerakarta,
H A R L O F F.

Ter afkondiging:
De Rijksbestuurder,
DJONGNAGOHIO.

RIJKSBLAD SOERAKARTA.

1939

No. 14. AGRARIA (DESA EN KAMPONG). Verordening tot aanvulling van de Desa - en Kampongpranatan.

Handwritten text in Indonesian script, likely a transcription of the original document's opening lines.

Handwritten text in Indonesian script, continuing the transcription.

Handwritten text in Indonesian script, continuing the transcription.

Handwritten text in Indonesian script, including the word 'Kort-dienstverband'.

Verordening van den Rijksbestuurder van Soerakarta van 18 November 1939 No. 10.

IN NAAM VAN DEN SOESOEHOE-
MAN VAN SOERAKARTA I

DE RIJKSBESTUURDER VAN
SOERAKARTA.

Overwegende, dat het wenschelijk is een voorziening te treffen, dat ingezetenen der desa, die een kort-dienstverband hebben aangegaan bij het Koninklijk Nederlandsch - Indische Leger, door de uitoefening van de uit dat dienstverband voortvloeiende verplichtingen hun ingezetenschap, en daarmee hun recht op den bouwgrond, niet verliezen;

Handwritten text in Indonesian script, likely a title or header.

Uitgegeven den 27 December 1939

Handwritten text in Indonesian script.

De Rijksbestuurder,

Handwritten text in Indonesian script.

Handwritten text in Indonesian script.

SOSRODININGRA

Main body of handwritten text in Indonesian script, containing the primary content of the document.

Bovenstaande verordening is door den Gouverneur van Soerakarta goedgekeurd bij besluit van 5 December 1939 No. 4/Pr.

Handwritten text in Indonesian script, likely a signature or official note.

De Gewestelijk Secretaris,

C. A. N. BOER





60. Paman PB x Kehis with Teling
bersama Kerden Iha



Susuhunan Pakubuwono X pada tahun 1932 (Djawa 12 (1932):
menghadap halaman 1)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



Juru Kunci menyerahkan sesaji Labuhan kepada Kyai Sapujagad, wakil Kraton Mahluk Halus Merapi, di Pelabuhan. Tujuannya agar Sunan P. B. X dan keluarga beserta rakyatnya diberi keselamatan, kedamaian, dan terbebas dari segala marabahaya.